

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024”** dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kebijakan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kebijakan Transportasi sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang kebijakan transportasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 berisikan program dan kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan selama Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai Badan Kebijakan Transportasi selama kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Kebijakan Transportasi pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dapat meningkatkan kinerja Badan Kebijakan Transportasi di masa yang akan datang.



Jakarta, 2025
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi


Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr
NIP. 19790629 199802 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2024 memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yang berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari Badan Kebijakan Transportasi yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mengamanatkan bahwa Indikator Kinerja (IK) harus berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari Badan Kebijakan Transportasi.

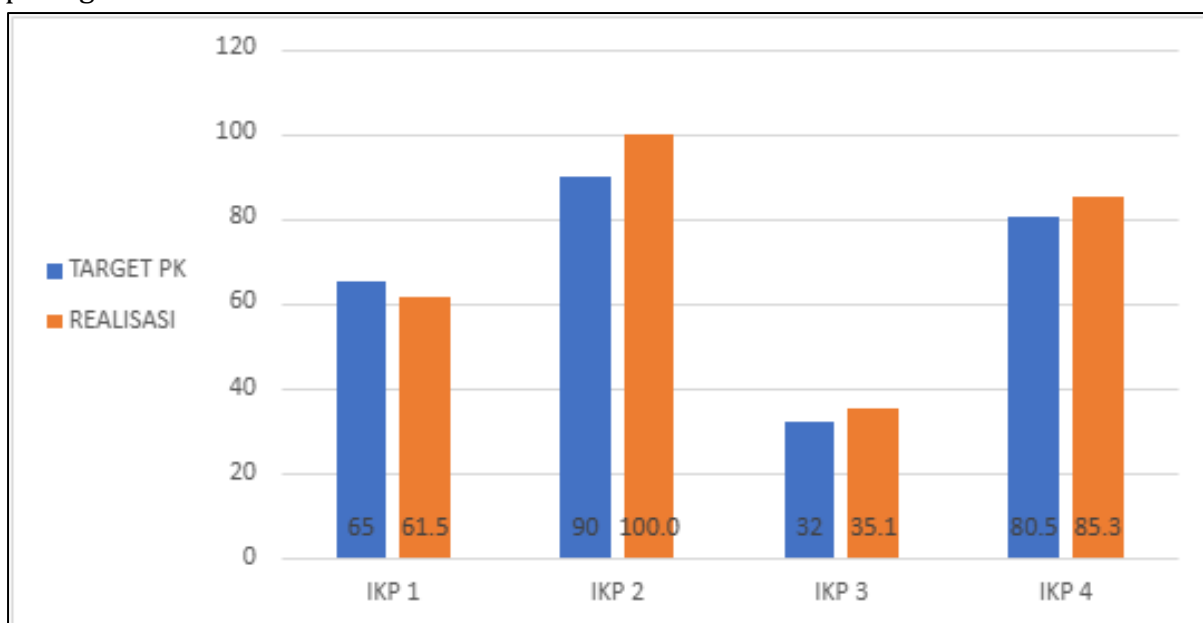
A. PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum, capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 telah mencapai target. Adapun rata-rata capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar **105,345%**. Dari empat Indikator Kinerja Program (IKP) dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam PK Tahun 2024 sebagai berikut:

1. IKP 1 yaitu Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi merupakan Instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi. Nilai *assessment* mandiri perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun 2024 diperoleh sebesar **61,464**. Nilai tersebut diperoleh dengan menginventarisir data dukung setiap rekomendasi kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam perhitungan IKK dengan mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Hasil dari penilaian mandiri sebesar 61,464 tersebut tergolong cukup, dengan target sebesar 65 diperoleh capaian kinerja sebesar **94,56**. Hal dapat diartikan bahwa target belum tercapai.
2. IKP 2 yaitu tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan transportasi (tahun berjalan). Saat ini semua target rekomendasi kebijakan telah selesai disusun dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan atau stakeholder terkait. Realisasi tahun 2024 sebesar **100%**. Jika dibandingkan dengan target PK maka diperoleh capaian kinerja sebesar **111,111%**;
3. IKP 3 yaitu tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan transportasi (t-2) dengan realisasi tahun 2024 sebesar **35,135%**. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan/ Sub Sektor/ *Stakeholder* dengan jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diselesaikan pada (t-2) yaitu 13 rekomendasi kebijakan dibandingkan dengan 37 total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target PK maka diperoleh capaian kinerja sebesar **109,797%**. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan.

4. IKP 4 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan Tahun 2024. Indeks RB tahun 2023 yaitu **85,26**, jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2024 maka diperoleh capaian kinerja sebesar **105,913%**. Saat ini, indeks RB Tahun 2024 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PANRB dan hasil indeks RB tersebut baru akan disampaikan pada tahun 2025 sehingga untuk sementara nilai capaian kinerja indeks RB menggunakan capaian indeks RB tahun sebelumnya.

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Perbandingan Target dan Realisasi IKP Badan Kebijakan Transportasi TA 2024

B. KINERJA ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp188.043.279.980,00** dengan pagu sebesar Rp196.457.340.000,00 sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar **95,72%**. Adapun rincian realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi didominasi oleh belanja barang sebesar Rp139.746.630.921,00, belanja pegawai yaitu sebesar Rp41.488.904.048,00 dan belanja modal sebesar Rp6.807.745.011,00, sesuai dengan lampiran 8. Apabila dibandingkan dengan target 2024, capaian anggaran saat ini masih belum memenuhi target, akan tetapi jika nilai persentase daya serap tersebut menunjukkan secara keseluruhan penyerapan anggaran sudah baik. Jika dibandingkan dengan target tahun ini, realisasi anggaran masih belum mencapai target. Capaian anggaran tahun 2024 sebesar 95,72%, sedangkan target realisasi anggaran sebesar 99,20%. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



*sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Gambar 2 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN	6
1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN	7
BAB II.....	8
PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 RENCANA STRATEGIS	8
2.2 PRIORITAS NASIONAL	10
2.3 PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	14
3.1.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	14
3.1.2 CAPAIAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI.....	15
1. Sasaran Program 1 - Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi.....	16
2. Sasaran Program 2 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	26
3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (BENCHMARKING)	29
3.2 ANALISIS EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA	31
3.2.1 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN	31
1. Efektivitas.....	33
2. Efisiensi	37
3.2.2 NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)	40
3.3 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA.....	42
3.3.1 PENGHARGAAN	42

3.3.2	KERJASAMA	44
3.4	ANALISIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2024.....	50
3.4.1	REALIASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	50
3.4.2	ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP TAHUN 2024	50
BAB IV		53
PENUTUP		53
4.1	KESIMPULAN	53
4.2	SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	54
LAMPIRAN 1.	CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	55
LAMPIRAN 2.	CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	56
LAMPIRAN 3.	CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	57
LAMPIRAN 4.	CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	58
LAMPIRAN 5.	REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TELAH TERKONFIRMASI KEMANFAATANNYA (T-2).....	59
LAMPIRAN 6.	RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN I TA 2024.....	67
LAMPIRAN 7.	RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN II TA 2024.....	68
LAMPIRAN 8.	RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN III TA 2024.....	69
LAMPIRAN 9.	RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN IV TA 2024.....	70
LAMPIRAN 10.	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023.....	71
LAMPIRAN 11.	RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024 BERDASARKAN LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	72
LAMPIRAN 12.	HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022.....	83
LAMPIRAN 13.	HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023.....	87
LAMPIRAN 14.	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Target dan Realisasi IKP Badan Kebijakan Transportasi TA 2024.....	iii
Gambar 2 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024	iv
Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi	3
Gambar 4 Persentase SDM setiap Satuan Kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	4
Gambar 5 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi	8
Gambar 6 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024 Kepala Badan Kebijakan Transportasi dengan Menteri Perhubungan.....	12
Gambar 7 Revisi Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2024 Kepala Badan Kebijakan Transportasi dengan Menteri Perhubungan.....	13
Gambar 8 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.....	27
Gambar 9 Rincian Bobot Penilaian Kinerja Anggaran.....	32
Gambar 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	39
Gambar 11 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	40
Gambar 12 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	42
Gambar 13 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.....	43
Gambar 14 Peluncuran E-Library Terintegrasi	44
Gambar 15 Target dan Realisasi Anggaran 2024	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan.....	4
Tabel 2 Komposisi SDM berdasarkan usia	5
Tabel 3 Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.....	5
Tabel 4 Jumlah SDM Badan Kebijakan Transportasi 2022 - 2024	6
Tabel 5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 - 2024	9
Tabel 6 Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024	15
Tabel 7 Realisasi Rekomendasi Kebijakan Tahun 2024	16
Tabel 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 1 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi	17
Tabel 9 Predikat Indeks Kualitas Kebijakan	17
Tabel 10 Hasil Penilaian Mandiri IKK TA 2024	18
Tabel 11 Target dan Realisasi IKP 1 2022 – 2024	19
Tabel 12 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 2 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi	20
Tabel 13 Target dan Realisasi IKP 2 2022 – 2024	20
Tabel 14 Judul Rekomendasi Kebijakan Tahun 2024	20
Tabel 15 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 3 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi	24
Tabel 16 Target dan Realisasi IKP 2 2022 – 2024	25
Tabel 17 Judul Rekomendasi Kebijakan yang Terkonfirmasi Kemanfatannya.....	25
Tabel 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 4 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi	27
Tabel 19 Realisasi Indeks RB Kemenhub 2020 – 2024.....	29
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kebijakan Transportasi	33
Tabel 21 Tabel Agregasi Capaian RO Satker	34
Tabel 22 Nilai Penggunaan SBK	37
Tabel 23 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi 2024.....	39
Tabel 24 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	41
Tabel 25 Nilai Kinerja Anggaran	41
Tabel 26 Kerjasama Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	44
Tabel 27 Perkembangan Pagu Anggaran 2022-2023	50
Tabel 28 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2024	51
Tabel 29 Capaian Daya Serap Per-Satuan Kerja Tahun 2024.....	51
Tabel 30 Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024.....	53

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Kebijakan Transportasi merupakan lembaga yang berfungsi dalam melaksanakan *policy research* di bidang transportasi yang berperan penting dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan tugas analisis kebijakan diarahkan dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa transportasi, yaitu melalui (1) Rekomendasi rancangan kebijakan dan rekomendasi pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi; (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi; (3) Pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang transportasi; dan (4) Penyediaan data hasil kajian kebijakan di bidang transportasi.

Sebagai unit kerja yang ditunjuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan analisis kebijakan transportasi, Badan Kebijakan Transportasi sesungguhnya memiliki potensi cukup besar untuk mengkoordinasikan/ mengkonsolidasikan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dukungan analisis kebijakan di lingkungan internal Kementerian Perhubungan. Peran sebagai lembaga analisis kebijakan bidang transportasi di tingkat pemerintahan pusat juga menjadikan Badan Kebijakan Transportasi memiliki potensi sekaligus tantangan untuk dapat mensinergikan kegiatan analisis kebijakan bidang transportasi khususnya dalam lingkup nasional dengan menggandeng perguruan tinggi dan instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah.

Isu-isu strategis sektor transportasi yang semakin meningkat, dinamis, dan kompleks pada lingkup global, nasional, dan lokal membutuhkan kegiatan analisis kebijakan bidang perhubungan yang tepat, cepat dan akurat. Permasalahan di bidang transportasi sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat sasaran, kegiatan analisis kebijakan Badan Kebijakan Transportasi didasarkan pada isu-isu strategis sektor transportasi terkini. Secara lebih khusus pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan mengacu pada arahan direktif Presiden, penugasan Menteri Perhubungan, dan usulan subsector maupun dari Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi 2022 – 2024.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022, tugas Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Sedangkan fungsi Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

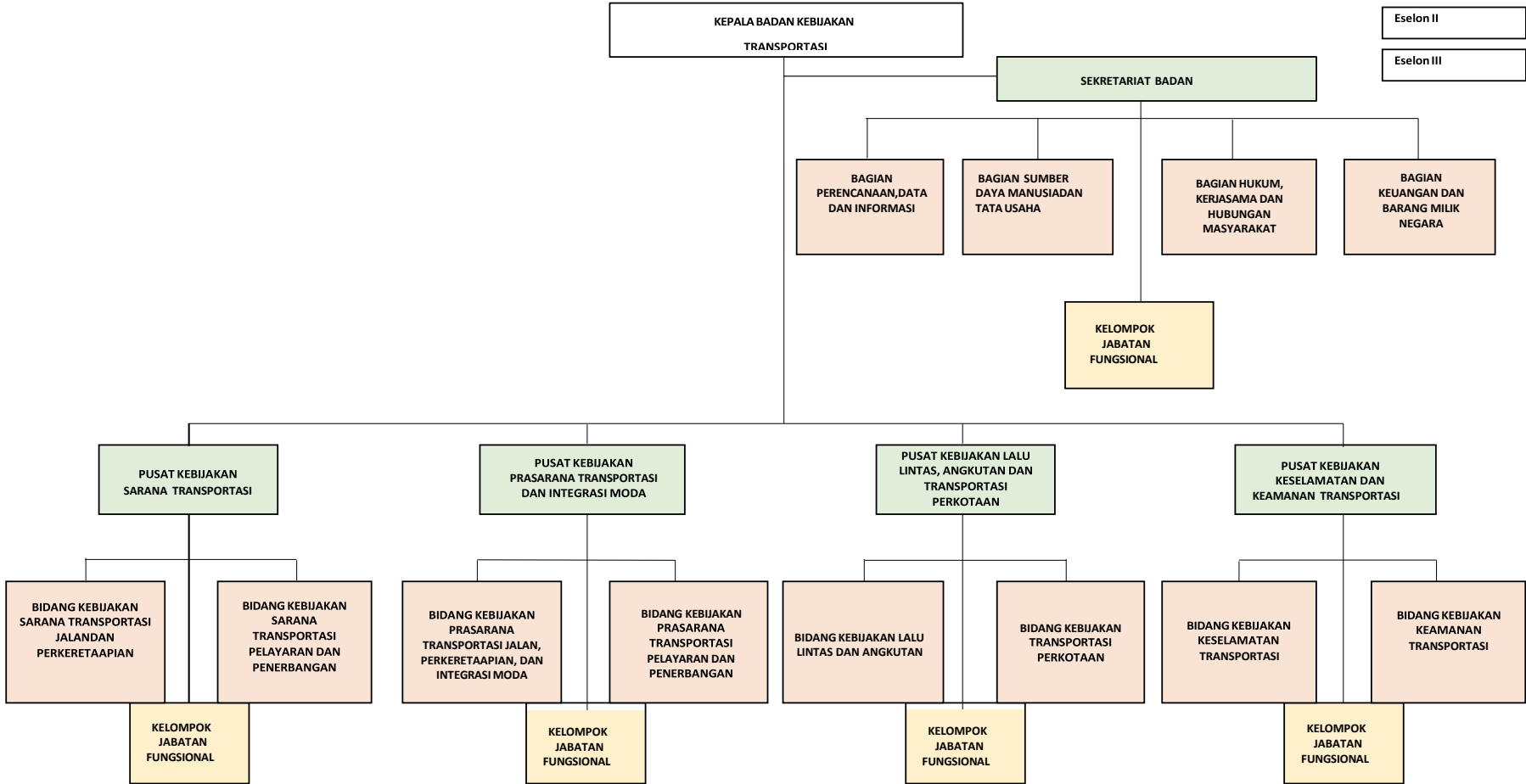
- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- c. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
- d. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit satuan kerja, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
3. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
4. Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan;
5. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Struktur organisasi Badan Kebijakan Transportasi menitikberatkan pada fungsi (non-matra), sehingga ini akan merubah pola kompetensi sumber daya manusia di masing-masing unit kerja. Setiap Pusat Kebijakan diperkuat oleh Pemangku Jabatan Fungsional dengan keahlian spesifik, antara lain: Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas BKT. Untuk dapat meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas yang bersifat multi perspektif, multi disiplin, serta dalam keterkaitan yang bersifat sistemik dimungkinkan mobilitas sumber daya manusia Jabatan Fungsional antar Unit Kerja Pusat. Adapun Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada **gambar 3**.

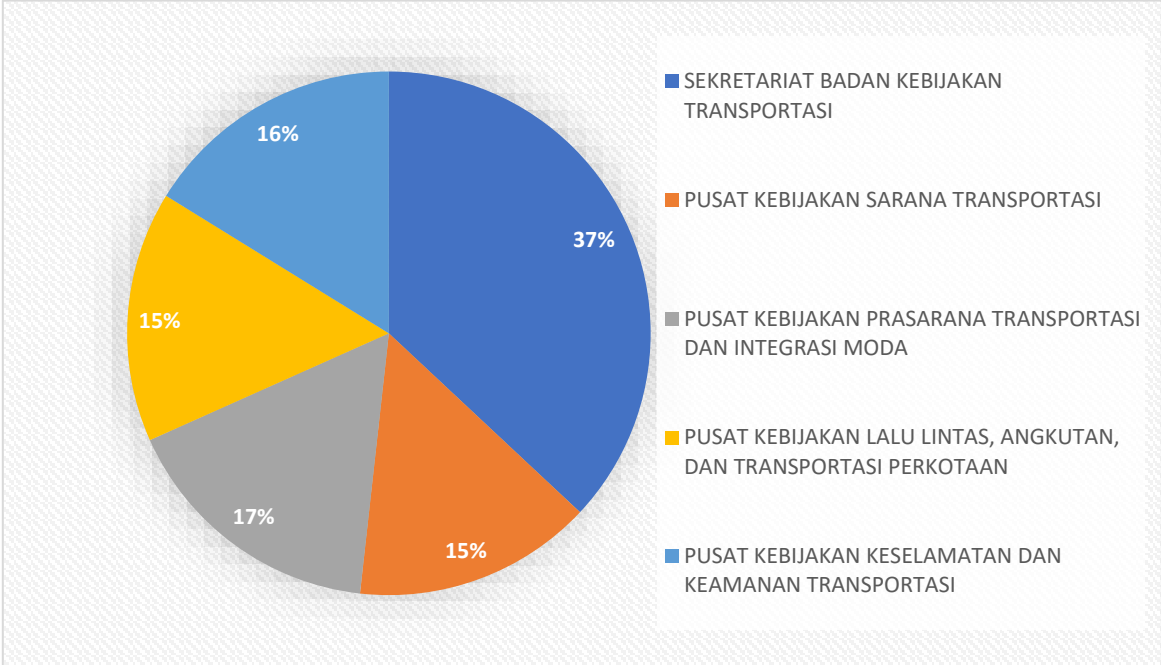
RENCANA STRATEGIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022-2024



Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Kebijakan Transportasi. Jumlah SDM Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024 tercatat sebanyak 284 pegawai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4 Persentase SDM setiap Satuan Kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

Untuk mendukung sistem kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, terdapat beberapa level pendidikan terakhir pegawai. Pada tahun 2024, komposisi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan didominasi oleh lulusan S1/DIV. Adapun sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

UNIT KERJA	S3	S2	S1/ D-IV	D-III	D-II/D-I	SMA	TOTAL
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	2	25	62	10	1	5	105
PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	2	14	21	3	1	1	42
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	1	16	25	4	1	0	47
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	0	18	21	3	1	1	44

UNIT KERJA	S3	S2	S1/ D-IV	D-III	D-II/D-I	SMA	TOTAL
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	3	14	22	2	1	4	46
TOTAL	8	87	151	22	5	11	284

Jika dilihat dari sisi usia, sebaran SDM di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi di dominasi rentang usia 21 s.d. 30 tahun yaitu sebanyak 125 pegawai, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 Komposisi SDM berdasarkan usia

UNIT KERJA	21-30 TAHUN	31-40 TAHUN	41-50 TAHUN	51-65 TAHUN	TOTAL
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	46	38	14	7	105
PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	16	15	7	4	42
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	20	14	9	4	47
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	22	9	7	6	44
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	21	11	8	6	46
TOTAL	125	87	45	27	284

Untuk menunjang rangkaian kegiatan proses penyusunan rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai berbagai macam jabatan kepakaran sebagai berikut:

Tabel 3 Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
ANALIS KEBIJAKAN	85	PERENCANA	16
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	10	STATISTISI	8
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1	PRANATA KOMPUTER	14
ANALIS SDM APARATUR	8	ANALIS ANGGARAN	0
ARSIPARIS	4	PRANATA HUMAS	9
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	PUSTAKAWAN	5
PENATA PENERBITAN ILMIAH	0	ANALIS HUKUM	1
TOTAL JF			163

Dalam melaksanakan fungsi Badan Kebijakan Transportasi, Analis Kebijakan dapat berkolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansi, terutama Jabatan Fungsional yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun jumlah pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi periode 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah SDM Badan Kebijakan Transportasi 2022 - 2024

JABATAN FUNSIONAL	2022	2023	2024
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	83	100	105
PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	44	45	42
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	42	48	47
PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	44	48	44
PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	45	50	46
TOTAL	258	291	284

1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN

Sebagai unit kerja yang ditunjuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan analisis kebijakan transportasi, Badan Kebijakan Transportasi sesungguhnya memiliki potensi cukup besar untuk mengkoordinasikan/ mengkonsolidasikan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dukungan analisis kebijakan di lingkungan internal Kementerian Perhubungan. Peran sebagai lembaga analisis kebijakan bidang transportasi di tingkat pemerintahan pusat juga menjadikan Badan Kebijakan Transportasi memiliki potensi sekaligus tantangan untuk dapat mensinergikan kegiatan analisis kebijakan bidang transportasi khususnya dalam lingkup nasional dengan menggandeng perguruan tinggi dan instansi, serta stakeholder terkait di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan daerah, peran Badan Kebijakan Transportasi untuk dapat melayani masyarakat di tingkat lokal adalah melalui pelaksanaan analisis kebijakan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Isu-isu strategis sektor transportasi yang semakin meningkat, dinamis, dan kompleks pada lingkup global, nasional, dan lokal membutuhkan kegiatan analisis kebijakan bidang perhubungan yang tepat, cepat dan akurat. Permasalahan di bidang transportasi sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat sasaran, kegiatan analisis kebijakan Badan Kebijakan Transportasi didasarkan pada isu-isu strategis sektor transportasi terkini. Secara lebih khusus pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan mengacu pada arahan direktif Presiden, penugasan Menteri Perhubungan, dan usulan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

Bab II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis, Prioritas Nasional, Rencana Kerja, dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi pada tahun yang bersangkutan terdiri dari:

- a) Analisis Capaian Kinerja
Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun berjalan berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.
- b) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- c) Capaian Keberhasilan Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Lainnya
- d) Analisis Capaian Anggaran
Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

Bab IV – Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Kebijakan Transportasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Menyajikan lampiran yang mendukung Laporan Kinerja Badan Kebijakan Transportasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

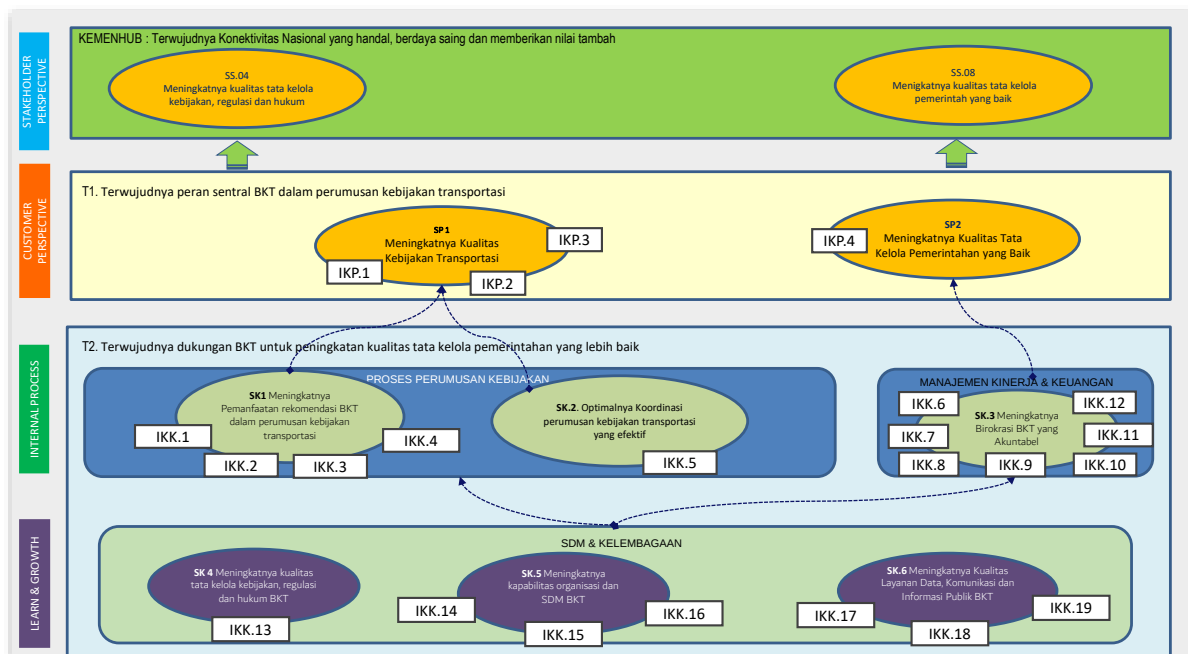
2.1 RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2022-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

“Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (center of excellence) yang terpercay dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat, dan manfaat guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi dan memperhatikan permasalahan dan capaian pada tahun 2022-2024 serta menjabarkan misi Badan Kebijakan Transportasi. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:

IKP Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024 yang menjadi dasar analisa capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam peta strategis berikut ini :



Gambar 5 Peta Strategis Badan Kebijakan Transportasi

Korelasi antara tujuan, sasaran program, indikator kinerja program serta indikator dan metode perhitungan indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 - 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	50 (Cukup)	50 (Cukup)	65 (Baik)
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	80	85	90
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	30	32	32
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	79,5	80	80,5

Adapun penjabaran dari perspektif Peta Strategis yang dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi, dengan indikator kinerja Program yaitu sebagai berikut:

1) IKP 1 : Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi

Instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, penagturan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi. Metode perhitungan IKP 1 berdasarkan Surat Edaran Kepala LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas.

2) IKP 2 : Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)

Rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi dan diterima oleh Menteri Perhubungan dan unit eselon I lain sebagai dasar upaya tindak lanjut melalui disposisi Menteri Perhubungan atau pimpinan unit eselon I lain kepada unit kerja dibawahnya atau

disetujui untuk ditindaklanjuti/diproses/ditetapkan sesuai prosedur yang diberlakukan. Metode perhitungan IKP 2 yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan stakeholders) / Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diselesaikan pada tahun berjalan x 100%.

3) IKP 3 : Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)

Rekomendasi kebijakan bersifat *intermediate outcome* adalah rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi pada periode waktu (t-2) dan telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan unit eselon I lain sebagai referensi penyusunan suatu kebijakan bidang perhubungan ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis bidang perhubungan.

- b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

IKP 4 : Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

2.2 PRIORITAS NASIONAL

Dalam mendukung program prioritas nasional, Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun 8 (delapan) rekomendasi kebijakan terkait hal tersebut, yang terdiri dari 3 (tiga) rekomendasi kebijakan terkait Ibukota Negara, 2 rekomendasi kebijakan 3TP, 1 rekomendasi kebijakan terkait KSPN, dan 2 rekomendasi kebijakan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan. Adapun judul rekomendasi kebijakan yang terkait program prioritas nasional sebagai berikut:

Satuan Kerja	Judul Rekomendasi Kebijakan
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN.
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1. Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN; 2. Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah IKN; 3. Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata 4. Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia.
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP)
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Analisis Risiko pada Bangunan Jembatan dan Terowongan pada Jalur Kereta Api; 2. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan Jalan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang disusun secara berjenjang yang masih mengacu pada Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Dokumen tersebut telah ditandatangani Kepala Bagian / Kepala Bidang dengan Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon II dengan Eselon I.

Pada tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 terkait kebutuhan revisi dokumen Perjanjian Kinerja, Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun sebanyak dua dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu

- a) Dokumen PK awal yang disusun pada bulan Januari 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp196.457.340.000,00 dengan pimpinan Badan Kebijakan Transportasi Bapak Robby Kurniawan dan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi;
- b) Dokumen PK akhir yang disusun pada bulan Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp196.457.340.000,00 dengan pimpinan Badan Kebijakan Transportasi Bapak Robby Kurniawan dan Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Kurniawan
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan



BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



ROBBY KURNIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	SP 1 Meningkatkan Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	65 (Baik)
		IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90
		IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
2.	SP 2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	80,5

KEGIATAN

- Formulasi Kebijakan Transportasi
- Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan
- Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan
- Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan
- Legislasi dan Litigasi Kebijakan

ANGGARAN

- Rp. 107.248.845.000,00
- Rp. 2.857.310.000,00
- Rp. 85.616.903.000,00
- Rp. 639.110.000,00
- Rp. 95.172.000,00

Jakarta, Januari 2024

Disetujui,
Menteri Perhubungan



BUDI KARYA SUMADI

Kepala
Badan Kebijakan Transportasi



ROBBY KURNIAWAN

Gambar 6 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024 Kepala Badan Kebijakan Transportasi dengan Menteri Perhubungan



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Kurniawan

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dudi Purwagandhi

Jabatan : Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Menteri Perhubungan

DUDI PURWAGANDHI

Jakarta, Desember 2024

Pihak Pertama

Kepala

Badan Kebijakan Transportasi

ROBBY KURNIAWAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
1.	SP 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks
		Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	85 (Baik)		
		IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90
		IKP 3	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32
2.	SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks
				80,5	

KEGIATAN

- Formulasi Kebijakan Transportasi
- Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan
- Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan
- Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan
- Legislasi dan Litigasi Kebijakan

ANGGARAN

- Rp. 107.248.845.000,00
- Rp. 2.857.310.000,00
- Rp. 85.616.903.000,00
- Rp. 639.110.000,00
- Rp. 95.172.000,00

Disetujui,

Menteri Perhubungan

DUDI PURWAGANDHI

Jakarta, Desember 2024

Kepala

Badan Kebijakan Transportasi

ROBBY KURNIAWAN

Gambar 7 Revisi Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2024 Kepala Badan Kebijakan Transportasi dengan Menteri Perhubungan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

3.1.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Badan Kebijakan Transportasi dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis *web*, yaitu *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk *monitoring* capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Metode pengukuran kinerja lingkup Badan Kebijakan Transportasi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang disusun dalam laporan monitoring capaian kinerja setiap triwulan. Selain itu, sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan *monitoring* capaian realisasi target *output* kegiatan, Badan Kebijakan Transportasi menyusun laporan Rencana Aksi Kinerja Bulanan. Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap Bulan. Selain Laporan Rencana Aksi Kinerja, Badan Kebijakan Transportasi menyusun Laporan Evaluasi Program secara periodik setiap triwulan sebagai bentuk *monitoring* kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan *monitoring* capaian target dan proses *output*/ kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi e-monev penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3> dalam bentuk *monitoring* realisasi target anggaran dan output kegiatan.

Capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target rencana dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.

Penghitungan persentase capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penetapan cara perhitungan persentase kinerja untuk Badan Kebijakan Transportasi adalah apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja pada Tahun 2024 dalam Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Badan Kebijakan Transportasi merupakan unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Adapun susunan organisasi tata kerja ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kebijakan Transportasi mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024. Target yang terdapat dalam RENSTRA kemudian diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja yang terdapat dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja, berikut adalah pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi pada TA 2024:

Tabel 6 Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja
SP 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	65	61,464	94,560

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90	100,000	111,111
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32	35,135	109,797
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Program 1					105,156
SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	80,5	85.260*	105,913
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Program 2					105,913
Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi TA 2024					105,345

*Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub TA 2023

Adapun capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi jika dijabarkan setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 - Meningkatkan Kualitas Kebijakan Transportasi

Salah satu program Badan Kebijakan Transportasi yaitu program infrastruktur konektivitas yang digunakan untuk menjalankan fungsi strategis perumusan kebijakan eksisting maupun inisiasi baru dan kegiatan percepatan implementasi kebijakan. Pada tahun 2024, telah dilakukan penyusunan rekomendasi kebijakan sebanyak 63 (enam puluh tiga) rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Rekomendasi Kebijakan Tahun 2024

No	Satuan Kerja	2024
1.	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	13
2.	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi, dan Integrasi Moda	15
3.	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	16
4.	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	20
Total		64

Sasaran program 1 Badan Kebijakan Transportasi adalah meningkatnya kualitas kebijakan transportasi. Pencapaian sasaran program Badan Kebijakan Transportasi diukur dengan tiga Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu sebagai berikut:

a. IKP 1 – Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi

Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi merupakan Instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan, pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi. Adapun cara menghitung indikator tersebut mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan yang dilakukan secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel dimana bukti dukung tahapan disesuaikan dengan *output* yang dihasilkan Badan Kebijakan Transportasi. Perhitungan tersebut sebagai *self assessment* kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi.

Tabel 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 1 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi

KINERJA TA. 2024				ANGGARAN TA. 2024			CAPAIAN PK 2023 (%)
TARGET PK	TARGET TW IV	REALISASI (%)	CAPAIAN PK (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	
65 (Baik)	65 (Baik)	61,464	94,560	30.501.435.000	29.780.752.088	97,637	113,93

Nilai *assessment* mandiri perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 diperoleh sebesar **61,464**. Nilai tersebut diperoleh dengan menginventarisir data dukung setiap rekomendasi kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam perhitungan IKK dengan mengacu kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Nilai realisasi sebesar 61,464, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target PK. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target tahun lalu, diperoleh realisasi yang lebih tinggi, dimana realisasi tahun 2023 sebesar **56,966**.

Hasil dari penilaian mandiri sebesar 61,464 tersebut tergolong dalam predikat **cukup**. Berdasarkan *toolkit* Indeks Kualitas Kebijakan 2023, nilai akhir IKK diperoleh dengan predikat berikut:

Tabel 9 Predikat Indeks Kualitas Kebijakan

Nilai	Predikat
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
<50,00	Kurang

Berikut hasil penilaian mandiri IKK setiap judul rekomendasi kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam perhitungan IKK:

Tabel 10 Hasil Penilaian Mandiri IKK TA 2024

No	Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan	Nilai Assessment IKK
1	SARANA	Perumusan Kebijakan Penerapan Standar UN ECE Pada Bus (NSPK)	70.47%
2	SARANA	Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN	64.90%
3	PTIM	Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN	63.00%
4	PTIM	Pengoperasian Bandar Udara Perairan	63.00%
5	LLATP	Perumusan Kebijakan Mobilitas Pergerakan Orang (Asal Tujuan Transportasi Nasional)	68.13%
6	LLATP	Perumusan Kebijakan pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024	68.20%
7	KKT	Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan State Safety Program (SSP) untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan	46.05%
8	KKT	Integrasi Data Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Mendukung Program RUNK	48.88%
RATA - RATA			61,58%

Perolehan realisasi perhitungan mandiri IKK tahun 2024 cukup baik, dimana dari 8 (delapan) judul rekomendasi kebijakan yang terpilih menjadi sampel dalam perhitungan IKK, 6 (enam) diantaranya telah mencapai target.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Pada tahun 2024, terdapat beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan, antara lain:

- 1) Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan secara nasional dilaksanakan tiap 2 (dua) tahun sekali;
- 2) Kebijakan yang menjadi objek pengukuran penilaian kualitas kebijakan secara nasional merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK.

Sehubungan dengan *output* yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi bukan merupakan suatu kebijakan (Peraturan Perundang-undangan), sehingga Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun formulasi perhitungan Indeks Kualitas

Kebijakan dengan mengadopsi metode perhitungan dari LAN dan bukti dukung disesuaikan dengan proses bisnis di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Capaian kinerja pada tahun 2024 untuk IKP 1 yaitu sebesar **94,560%**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sebesar 113,931%, maka capaian tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu. Akan tetapi, jika dibandingkan realisasi tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 56,966. Capaian anggaran pada tahun 2024 untuk IKP 1 yaitu sebesar **97,64%**. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat *gap* yang signifikan antara capaian kinerja dan capaian anggaran. Sedangkan pada tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi Badan Kebijakan Transportasi masih mengacu pada Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berdasarkan RENSTRA Badan Litbang Perhubungan 2020 – 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Target dan Realisasi IKP 1 2022 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	50	Indikator Kinerja menggunakan Indikator RENSTRA Badan Litbang Perhubungan 2020 - 2024	
2023	50	56,966	113,931
2024	65	61,464	94,560

Pada periode renstra Badan Kebijakan Transportasi 2025 – 2029, Indeks Kualitas Kebijakan tidak menjadi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Badan Kebijakan Transportasi, akan tetapi direncanakan menjadi Indikator Kinerja Strategis Kementerian Perhubungan. Apabila digunakan untuk IKSP level Kementerian maka perlu melakukan penyusunan pedoman tentang Indikator Indeks Kualitas Kebijakan dengan mengacu pada Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan beserta dengan peta proses bisnisnya dilingkungan Kementerian Perhubungan.

b. IKP 2 – Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)

Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan transportasi (tahun berjalan) yaitu jumlah rekomendasi kebijakan di bidang transportasi yang tertuang dalam bentuk *policy brief* baik swakelola maupun kontraktual yang diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi kepada Menteri Perhubungan/sub sektor/*stakeholder* terkait dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan. Indikator tersebut dapat diperoleh menggunakan perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diterima Menteri Perhubungan/sub sektor/stakeholder}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diselesaikan pada tahun berjalan}}$$

Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, Badan kebijakan Transportasi bekerjasama dengan *stakeholders* seperti akademisi, pakar transportasi, Pemerintah Daerah, sub sektor terkait, dll.

Tabel 12 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 2 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi

KINERJA TA. 2024					ANGGARAN TA. 2024			CAPAIAN PK 2023 (%)
TARGET PK	TARGET TW IV	REALISASI	CAPAIAN TW IV	CAPAIAN PK (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	
90	90	100,000	111,111	111,111	46.218.067.000	42.954.743.802	92,93	117,64

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh realisasi tahun 2024 sebesar **100%** dengan target PK sebesar 90% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **111,111%**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa realisasi 2024 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun ini sama dengan realisasi tahun 2023, sehingga dengan peningkatan target sebesar 5% (target 2023 sebesar 85%) maka diperoleh capaian tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi Badan Kebijakan Transportasi masih mengacu pada Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berdasarkan RENSTRA Badan Litbang Perhubungan 2020 – 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Target dan Realisasi IKP 2 2022 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	80	Indikator Kinerja menggunakan Indikator RENSTRA Badan Litbang Perhubungan 2020 - 2024	
2023	85	100,000	117,640
2024	90	100,000	111,111

Capaian anggaran pada tahun 2024 untuk IKP 1 yaitu sebesar **92,93%**. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat *gap* yang signifikan antara capaian kinerja dan capaian anggaran.

Adapun judul 63 (enam puluh tiga) rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan/sub sektor/*stakeholder* terkait dalam bentuk nota dinas, surat, maupun rancangan peraturan yaitu sebagai berikut:

Tabel 14 Judul Rekomendasi Kebijakan Tahun 2024

Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Monorel Gantung di Indonesia; 2. Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN; 3. Perumusan Kebijakan Pengoperasian Sepeda Motor Pada Jalan dengan Alinyemen Vertikal yang Melebihi Standar Untuk Mendukung Keselamatan Berkendara; 4. Perumusan Kebijakan Potensi Sarana Kapal Penyeberangan untuk Angkutan Barang Berbahaya di Lintas Merak Bakauheni; 5. Perumusan Kebijakan Pengoperasian Balon Udara Berpenumpang Untuk Tujuan Wisata;

Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
	6. Perumusan Kebijakan Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Maritim Autonomous Surface Ships (MASS); 7. Perumusan Kebijakan Kapal RO-RO untuk perintis Laut; 8. Analisa Kebijakan Bidang Sarana: Review Regulasi Terkait Banyaknya Pelanggaran PUTA Dibawah 25 Kg di Indonesia (Quick Win); 9. Analisa Kebijakan Bidang Sarana: Kesiapan Sarana dan Prasarana Bandar Udara dan Navigasi Penerbangan serta Tanggung Jawab Asuransi dalam Pengoperasian PUTA untuk Komersial Penumpang dan Barang di Indonesia; 10. Analisa Kebijakan Bidang Sarana: Potensi SeaWIG sebagai sarana transportasi wisata perairan di wilayah kepulauan; 11. Perumusan Kebijakan Penggunaan Sarana Teknologi Pada Kendaraan Bermotor Sebagai Alat Deteksi Dini Kesesuaian Muatan (NSPK); 12. Perumusan Kebijakan Penerapan Standar UN ECE Pada Bus (NSPK); 13. Perumusan Kebijakan Skema Pengadaan dan Pengelolaan Sarana Kereta Api yang Berkelanjutan (NSPK).
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1. Kebijakan Pengoperasian Bandar Udara Perairan (QUICKWIN); 2. Analisis Pengembangan Infrastruktur Transportasi Sungai; 3. Analisis Penyelenggaraan Transportasi di Wilayah Penyangga IKN; 4. Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhanan dalam Pengembangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia; 5. Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata; 6. Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN; 7. Analisis Penguatan Konektivitas Hinterland dan Pelabuhan Utama Indonesia melalui Angkutan Kontainer; 8. Evaluasi dan Optimalisasi Skema Kerja Sama dalam Peningkatan Infrastruktur Bandar Udara; 9. Evaluasi peran program kegiatan angkutan udara perintis dan jembatan kargo udara dalam mendukung pembangunan prioritas nasional di pulau papua; 10. Evaluasi Tipologi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan; 11. Analisa Kebijakan Strategis Bidang Prasarana dan Transportasi Intermoda : Capaian Kinerja Sektor Transportasi Udara 2015-2024; 12. Analisa Kebijakan Strategis Bidang Prasarana dan Transportasi Intermoda : Review Kebijakan Penyelenggaraan Bandar Udara Perairan; 13. Analisa Kebijakan Strategis Bidang Prasarana dan Transportasi Intermoda : Integrasi Moda pada Simpul Transportasi Penyeberangan Pelabuhan Merak; 14. Analisa Kebijakan Strategis Bidang Prasarana dan Transportasi Intermoda : Optimalisasi Konektivitas Tol Laut dengan Angkutan Penyeberangan;

Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
	15. Analisa Kebijakan Strategis Bidang Prasarana dan Transportasi Intermoda : Integrasi BRT Balikpapan City Trans dengan Angkutan Perkotaan.
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	1. Skema Pengembangan Kebijakan Kelembagaan Transportasi Perkotaan/aglomerasi; 2. Reviu PM 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan, dan Pembongkaran Barang dengan Kereta Api; 3. Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayaran; 4. Kebijakan Tarif Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi; 5. Perumusan Kebijakan Mobilitas Pergerakan Orang (Asal Tujuan Transportasi Nasional); 6. Perumusan Kebijakan Pengembangan Transportasi Last Mile dan First Mile dalam Mendukung Tol Laut dan Layanan Moda Utama dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Kerakyatan; 7. Perumusan Kebijakan pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024; 8. Perumusan Kebijakan Pergerakan Masyarakat pada Masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025; 9. Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Trem Otonom di IKN; 10. Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Transportasi Otonom di Indonesia; 11. Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Perumusan Kebijakan Mengenai Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan dalam Rangka Menghadapi Nataru Angleb Tahun 2025 Pada Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni; 12. Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Slot Time Penerbangan di Indonesia; 13. Analisa Kebijakan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Kajian Evaluasi capaian kinerja bidang transportasi darat; 14. Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Analisis dan Evaluasi Pola Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Lebaran 2024; 15. Direktif Menteri Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan: Analisis dan Evaluasi Pola Pergerakan Masyarakat pada Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024; 16. Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Suku Cadang Pesawat Udara Untuk Mempertahankan Tingkat Keselamatan Penerbangan; 2. Analisis Pengaturan Kelembagaan dan Sistem Pengelolaan State Safety Program (SSP) untuk Mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional; 3. Integrasi Data Lalu Lintas Angkutan Jalan Dalam Mendukung Program RUNK; 4. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang (Reviu PM 94 tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan); 5. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Pemutakhiran Data Perlintasan Sebidang di Indonesia; 6. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Risk Journey Management; 7. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Evaluasi Kebijakan Penanganan Masalah Over Dimension Over Load (ODOL) pada Angkutan Jalan; 8. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pengemudi; 9. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Rencana Penggabungan KSOP dan DISNAV serta Implikasi terhadap Keselamatan Pelayaran; 10. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Fatigue Management pada Pilot; 11. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Mitigasi Pencegahan Penyebaran Virus Cacar Monyet (MPOX) pada Sektor Transportasi Udara; 12. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi: Evaluasi Pemenuhan Aspek Keselamatan Angkutan Sungai di Indonesia; 13. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi (surat Menteri): Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kereta Feeder KA Cepat menjadi KA Komuter Bandung; 14. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi (surat Menteri): Rekomendasi Kebijakan terkait Pengawasan Operasional dan Penggunaan Armada Bus Pariwisata; 15. Analisa Kebijakan Bidang Keselamatan dan Keamanan Transportasi (surat Menteri): Pembatasan Usia Sarana Angkutan Umum dalam rangka Peningkatan Keselamatan Jalan; 16. Analisis Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur Kereta Api; 17. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum Untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan Jalan; 18. Evaluasi Kebijakan Pengawasan Sarana Perkeretaapian; 19. Evaluasi Kebijakan Penanganan Kondisi Darurat di Kapal;

Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
	20. Evaluasi Kebijakan Pengaturan Waktu Kerja dan Tempat Istirahat Pengemudi.

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan) merupakan indikator dalam RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi 2022 – 2024. Pada periode RENSTRA 2025 – 2029 Badan Kebijakan Transportasi, indikator tersebut tidak terdapat dalam RENSTRA.

c. IKP 3 – Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)

Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan transportasi (T-2) yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bersifat *intermediate outcome* yang diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi pada periode waktu (t-2) dan telah dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan/sub sektor/*stakeholder* terkait sebagai referensi penyusunan suatu kebijakan bidang perhubungan ataupun sebagai dasar perencanaan kegiatan teknis bidang perhubungan. Indikator tersebut dapat diperoleh menggunakan perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan/Sub Sektor/Stakeholder}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi (pada IKK 2 & IKK 4) yang diselesaikan pada (T - 2)}}$$

Tabel 15 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 3 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi

KINERJA TA. 2024					ANGGARAN TA. 2024			CAPAIAN PK 2023 (%)
TARGET PK	TARGET TW IV	REALISASI (%)	CAPAIAN TW IV (%)	CAPAIAN PK (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
32	32	35,135	109,797	109,797	-	-	-	125

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh realisasi tahun 2024 sebesar **35,135%**. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan/ Sub Sektor/ *Stakeholder* dengan jumlah rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang diselesaikan pada (t-2) yaitu 13 rekomendasi kebijakan dibandingkan dengan 37 total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target PK maka diperoleh capaian kinerja sebesar **109,797%**. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, maka capaian tahun ini masih lebih rendah, dimana capaian tahun 2023 diperoleh sebesar 125% dengan realisasi sebesar 40%. Sedangkan pada tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi Badan Kebijakan Transportasi masih mengacu pada Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berdasarkan RENSTRA Badan Litbang Perhubungan 2020 – 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Target dan Realisasi IKP 2 2022 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	30	Indikator Kinerja menggunakan Indikator RENSTRA Badan Litbang Perhubungan 2020 - 2024	
2023	32	40,000	125,000
2024	32	35,135	109,797

Sedangkan untuk anggaran, IKP 3 tidak mempunyai anggaran yang spesifik. Adapun kemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat dilihat pada **lampiran 5**. Berikut judul rekomendasi kebijakan yang telah terkonfirmasi kemanfaatannya:

Tabel 17 Judul Rekomendasi Kebijakan yang Terkonfirmasi Kemanfaatannya

Pusat Kebijakan	Judul Rekomendasi Kebijakan
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1. Evaluasi Pelaksanaan IM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Angkutan Penyeberangan; 2. Rekomendasi Kebijakan Penataan Terus/TUKS; 3. Rekomendasi Kebijakan Potensi Lost PNBPN Pengangkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Pelabuhan Penyeberangan.
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	5. Potensi Penerapan Land Value Capture dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi; 6. Kebijakan Pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel di Sektor Transportasi Udara; 7. Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Idle Bandar Udara; 8. Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara.
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	1. Survei Online Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023; 2. Tarif Langganan Bagi Pelajar/Mahasiswa Untuk Meningkatkan Okupansi dan Layanan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan; 3. Policy Brief Transportasi Perkotaan; 4. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Buy The Service (BTS).
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Buy The Service (BTS); 2. Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Maksar-Parepare melalui Sinergitas dan Konektivitas.

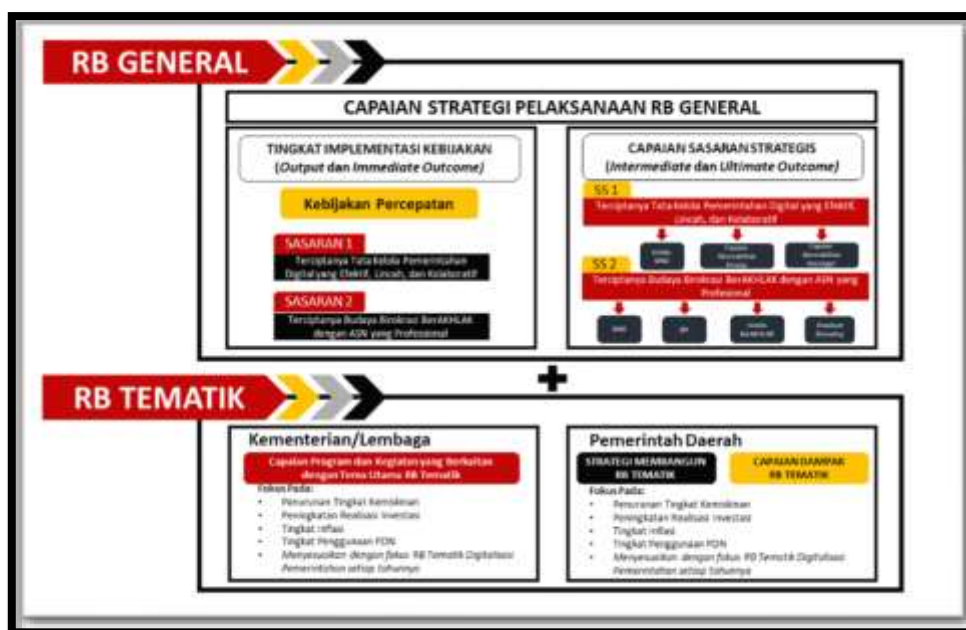
Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2) merupakan indikator yang terdapat dalam RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi 2022 – 2024. Pada periode RENSTRA 2025 – 2029 indikator dimaksud ditransformasi menjadi Indeks Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan, yaitu menghitung jumlah rekomendasi kebijakan / NSPK yang ditindaklanjuti oleh subsector dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan/ NSPK yang

dihasilkan. Agar rekomendasi kebijakan/ NSPK yang disusun dimanfaatkan oleh subsector, maka perlu adanya koordinasi dengan subsector dimulai dari tahapan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

2. Sasaran Program 2 - Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi Birokrasi adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem peyelenggaraan pemerintah. Tujuan dari Reformasi Birokrasi diantaranya mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait. Secara lebih rinci, di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan komponen-komponen pada setiap dimensi.



Gambar 8 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Dengan Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Badan Kebijakan Transportasi didasarkan nilai RB Kementerian Perhubungan yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Evaluasi Kementerian PANRB. Proses penilaian dilakukan pada Tahun 2024. Berdasarkan aplikasi *Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB*, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2023 adalah **85,26**, hal ini dapat diartikan bahwa indeks RB Kementerian Perhubungan termasuk dalam kategori **A**. Kategori BB mempunyai predikat “Memuaskan”, yaitu terdapat gambaran bahwa memenuhi sebagian kriteria sebagai instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yaitu **85,26**, jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2024 maka diperoleh capaian kinerja sebesar **105,913%**. Saat ini, indeks RB Tahun 2024 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PANRB.

Tabel 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran IKP 4 Tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi

KINERJA TA. 2024			ANGGARAN TA. 2024		
TARGET(%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN(%)
80,5	85,56*	105,913	119.737.838.000,00	115.307.784.090	96,3

*Indeks RB Kementerian Perhubungan TA 2023

Untuk mencapai target Indeks RB, Kementerian Perhubungan telah menyusun Rencana Aksi yang dilakukan pemantauan setiap triwulannya. Adapun rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat pada **Lampiran 11**. Berdasarkan hasil evaluasi internal pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian

Perhubungan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sebagian besar target rencana aksi RB general telah tercapai, namun masih terdapat yang belum tercapai pada indikator kegiatan utama:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada rencana aksi Pelaksanaan Monev penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan;
 - b. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI pada rencana aksi Pemantauan terhadap Unit Kerja yang sudah mendapatkan Predikat WBK/WBBM;
 - c. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan pada rencana aksi Pelatihan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada Unit kerja Eselon I.
2. Sebagian besar kegiatan pada RB general telah dilaksanakan sesuai dengan ekspektasi Rencana Aksi RB, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada indikator kegiatan utama:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada rencana aksi evaluasi penerapan aplikasi e-performance secara tepat waktu;
 - b. Indeks Reformasi Hukum pada rencana aksi pengusulan formasi Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Analisa peraturan perundang-undangan;
 - c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada rencana aksi melakukan monitoring revisi DIPA dan menyusun RPD per triwulan serta Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan.
3. Sebagian besar pelaksanaan rencana aksi RB general telah didukung perencanaan, namun masih terdapat beberapa rencana aksi yang belum didukung proses perencanaan yang memadai pada indikator kegiatan utama:
 - a. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Indeks Reformasi Hukum;
 - c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Opini BPK.
4. Seluruh pelaksanaan rencana aksi RB general telah didukung penganggaran yang memadai.
5. Sebagian besar pelaksanaan rencana aksi RB general telah dipantau dan dilaporkan secara memadai, namun masih terdapat beberapa rencana aksi yang belum dipantau dan dilaporkan secara memadai pada indikator kegiatan utama:
 - a. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE;
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Indeks Perencanaan Pembangunan;
 - d. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;
 - e. Tingkat Maturitas SPIP;
 - f. Indeks Kualitas Kebijakan;
 - g. Indeks Reformasi Hukum;

- h. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- i. Indeks Pembangunan Statistik;
- j. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan;
- k. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- l. Indeks Sistem Merit;
- m. Indeks BerAKHLAK.

Perbandingan realisasi Indikator Indeks RB Tahun 2023 dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan target tahun akhir Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Indeks RB Kemenhub 2020 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	79,5	78,400	98,616
2023	80	85,260	106,575
2024	80,5	85,260*	105,913

**Realisasi tahun 2024 menggunakan hasil penilaian RB tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dari tahun 2022 – 2023.

3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN UNIT KERJA LAINNYA (BENCHMARKING)

Indikator Badan Kebijakan Transportasi tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja dengan unit kerja lainnya dikarenakan tidak ada indikator yang sama pada unit kerja lainnya yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, sehingga pada tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi hanya dapat melaksanakan *benchmarking* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, dengan hasil sebagai berikut:

- a. *Benchmarking* antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023 dan Peraih SAKIP Award dari Kementerian PANRB dengan Predikat AA (Tertinggi) di Indonesia Tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan ini, antara lain:
 - a. Strategi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan AKIP yakni dengan mencermati hasil evaluasi Kementerian PAN RB dengan baik, terutama untuk catatan dan rekomendasi. Melakukan identifikasi OPD/Unit Kerja yang menjadi leading sector terhadap catatan dan rekomendasi. Melakukan rumusan tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi yang terjadwal untuk ditindaklanjuti. Berkoordinasi sampai tingkat pimpinan, untuk menguatkan komitmen para pihak. melakukan penguatan terus-menerus dan berkesinambungan terhadap implementasi 4 pilar SAKIP. Pastikan tindak lanjut

atas catatan dan rekomendasi serta upaya penguatan yang sudah dilakukan beserta bukti dukungannya dapat disampaikan kepada evaluator pada evaluasi tahun berikutnya;

- b. Strategi implementasi SAKIP untuk penguatan reformasi Birokrasi melalui efisiensi dan efektivitas program kegiatan dan akuntabilitas anggaran dengan Perencanaan Kinerja pada Dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA Perjanjian Kinerja/SKP secara SMART, Outcome oriented dan konsisten antar dokumen. Pengukuran kinerja dilakukan dengan sistem monev kinerja bulanan, triwulanan, semester, tahunan yang terkini dan terintegrasi. Pelaporan kinerja berupa laporan kinerja bulanan, triwulanan, semester, tahunan dalam sistem monev disertai data dan bukti dukung yang memadai. Evaluasi kinerja dilakukan dengan sistem verifikasi atas validitas data kinerja yang dilaporkan, dan rekomendasi perbaikan kinerja;
- c. Terdapat monitoring dan evaluasi performansi perorangan atau individu yang dilakukan oleh Pemprov DI Yogyakarta yakni melalui 5 langkah, antara lain:
 - 1) Langkah 1: Menyusun SKP sesuai DPA, Perjanjian Kinerja, Tusi, Tim Lintas Sektor. SKP harus *in line* dengan kinerja instansi dan kinerja atasan;
 - 2) Langkah 2: Targeting yang berupa target kuantitas, kualitas, tahunan, bulanan sesuai dengan ROPK dan Angkas;
 - 3) Langkah 3: Dialog Kinerja Atasan-Bawahan dilakukan untuk memastikan adanya pembinaan kinerja oleh atasan;
 - 4) Langkah 4: Performance Appraisal yakni berupa penilaian bulanan capaian target kuantitas dan kualitas oleh atasan;
 - 5) Langkah 5: Rewarding (TPP) diberikan berdasarkan capaian kinerja instansi kinerja individu dan kedisiplinan.
- d. Adapun ekosistem penyelenggaraan Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan Roadmap RB sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara sistematis partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim RB Pemda, Tim RB OPD, Agen Perubahan OPD, Akademisi, Masyarakat dan Dunia Usaha serta Sekretariat RB Pemda (Biro Organisasi);
- e. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan perlombaan dalam capaian kinerja pada SKPD melalui pemberian *reward and punishment* yang nantinya hasil perlombaan laporan kinerja perangkat daerah akan dibacakan di depan Gubernur dan dilakukan publikasi capaian kinerja. Hal ini sudah berlangsung selama 1 dekade dan kegiatan ini merupakan komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. *Benchmarking* antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan ini, antara lain:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki aplikasi mengenai pengelolaan SAKIP yang terintegrasi pada level kementerian sehingga lebih efektif dalam penerapan aplikasi;
- b. Dalam Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat tim kerja yang bersertifikasi dengan penugasan resmi berupa sirat keputusan pada level Eselon-1;
- c. Perlu adanya atensi lebih dari pimpinan organisasi terhadap Penyelenggaraan SAKIP, sejalan dengan hal tersebut sekiranya SAKIP dapat menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Rapat Pimpinan;
- d. Dalam pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan prinsip 5K yaitu: Keterlibatan pimpinan, Komitmen, Keselarasan Ketepatan waktu, dan Kolaborasi.

3.2 ANALISIS EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya merupakan nilai kinerja anggaran yang diperoleh dari hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Hasil tersebut dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut:

1. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
2. Nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik;
3. Nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup;
4. Nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang;
5. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.

3.2.1 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023, penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

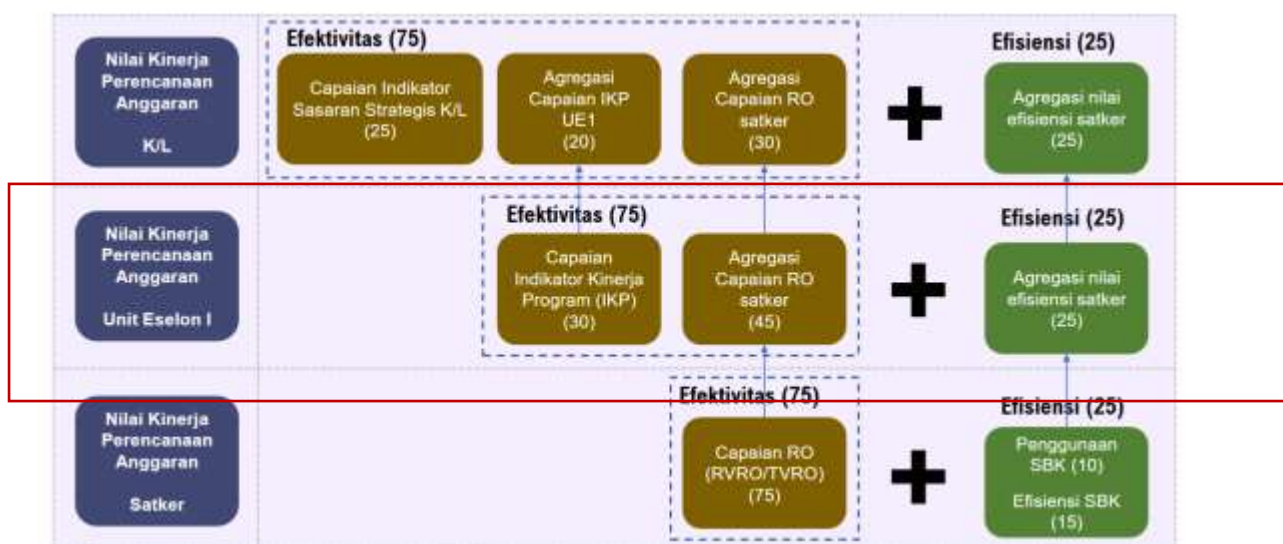
- Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
- Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
- Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Variabel Efisiensi

Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

- Penggunaan SBK; dan/atau
- Efisiensi SBK.

Nilai kinerja perencanaan anggaran Badan Kebijakan Transportasi dipengaruhi oleh variable efektivitas berupa agregasi capaian Rincian Output (RO) satker dan capaian Indikator Kinerja Program (IKP), serta variable efisiensi berupa agregasi nilai efisiensi satker. Adapun rincian bobot setiap parameter penilaian kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:



Gambar 9 Rincian Bobot Penilaian Kinerja Anggaran

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran Badan Kebijakan Transportasi dihitung dengan variabel sebagai berikut:

1. Efektivitas

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program tingkat Unit Eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

n : Jumlah Indikator Kinerja Program

Badan Kebijakan Transportasi memiliki 2 (dua) Program dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program pada Badan Kebijakan Transportasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Kebijakan Transportasi

Program	Sasaran Program	IKP	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja	CIKP
Program Infrasturkur Konektivitas	SP 1	IKP 1	65	61,464	94,560	105,345
	Meningkatnya	IKP 2	90	100,000	111,111	
	Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 3	32	35,135	109,797	
Program Dukungan Manajemen	SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4	80,5	85,260	105,913	

Capaian IKP merupakan rata-rata capaian Indikator Kinerja Program Badan Kebijakan Transportasi. Capaian IKP tahun 2024 yaitu sebesar **105,345**. Adapun jika lebih dari 100, maka capaian IKP yang digunakan adalah **100%**. Hal ini dapat diartikan bahwa target Perjanjian Kinerja telah tercapai.

b. Nilai Efektivitas Satker

Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menghitung rata-rata aritmatik capaian per RO seluruh Satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Pengukuran nilai efektivitas Satker dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

Pada tahun 2024, Badan Kebijakan Transportasi memiliki 13 (tiga belas) RO dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan Nilai Efektivitas Satker dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Tabel Agregasi Capaian RO Satker

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres
1	GA Program Infrastruktur Konektivitas	6891 Formulasi Kebijakan Transportasi	AEA Koordinasi (kegiatan)	051 Rancangan Kebijakan yang dikonsolidasikan (kegiatan)	4	4	100
2	WA Program Dukungan Manajemen	4652 Pengelolaan Organisasi dan SDM Perumus Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1	1	100
3	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956 Layanan BMN (Layanan)	1	1	100

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres
4	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	1	1	100
5	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100
6	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1	1	100
7	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1	1	100
8	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1	1	100

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres
9	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1	1	100
10	WA Program Dukungan Manajemen	4653 Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Perumus Kebijakan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	1	1	100
11	WA Program Dukungan Manajemen	4655 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1	1	100
12	WA Program Dukungan Manajemen	4655 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perumus Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1	1	100
13	WA Program Dukungan Manajemen	6892 Legislasi dan Litigasi Kebijakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1	1	100

Sumber : Aplikasi SMART 13 Januari 2025

$$NEF = \frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai efektivitas satker Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 sebesar **100%**.

2. Efisiensi

a. Agregasi Nilai Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU. Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO \text{ SBKK} + \sum RO \text{ SBKU}}{\sum RO \text{ SBKK dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

Tabel 22 Nilai Penggunaan SBK

No.	RO	Indeks	Indeks	Selisih	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
		SBK	Realisasi Anggaran		Per RO (%)	Per RO (%)	
1	4653.EBA.956 Layanan BMN (Layanan) SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	139.000.000	1.246.657.506	-1.107.657.506	-797	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK.
2	4655.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan) SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	458.000.000	427.065.095	30.934.905	6,75	6,75	
3	4653.EBA.956 Layanan BMN (Layanan) PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	10.000.000	226.100.119	-216.100.119	-2,161	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK.
4	4653.EBA.956 Layanan BMN (Layanan) PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	10.000.000	281.212.565	-271.212.565	-2,712	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK.

No.	RO	Indeks	Indeks	Selisih	Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
		SBK	Realisasi Anggaran		Per RO (%)	Per RO (%)	
5	4653.EBA.956 Layanan BMN (Layanan) PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	10.000.000	301.399.095	-291.399.095	-2,914	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK.

Berdasarkan tabel tersebut, penggunaan anggaran di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi berjumlah 1 yang sesuai dengan SBK (dari total 5 RO yang sesuai SBK), yaitu Layanan Hubungan Masyarakat. Sehingga, nilai penggunaan SBK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Penggunaan SBK} = \frac{1}{5} = 20\%$$

b. Agregasi Nilai Efisiensi Satker

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja
Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK
n : Jumlah RO SBK

$$E_{sbk} = \left\{ \left(\frac{(458.000.000 - 427.065.095)}{458.000.000} \times \frac{1}{5} \right) \times 100\% \right\} = \left\{ \frac{30.934.905}{458.000.000} \times \frac{1}{5} \right\} \times 100\% = 1,35$$

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NESBK : Nilai Efisiensi SBK

ESBK : Efisiensi SBK

Mengacu pada pengukuran efisiensi alokasi diatas, maka nilai efisiensi alokasi pada Badan Kebijakan Transportasi tersebut sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{1,35}{20\%} \times 100\% = 6,75\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai-nilai yaitu:



Gambar 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Sehingga diperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

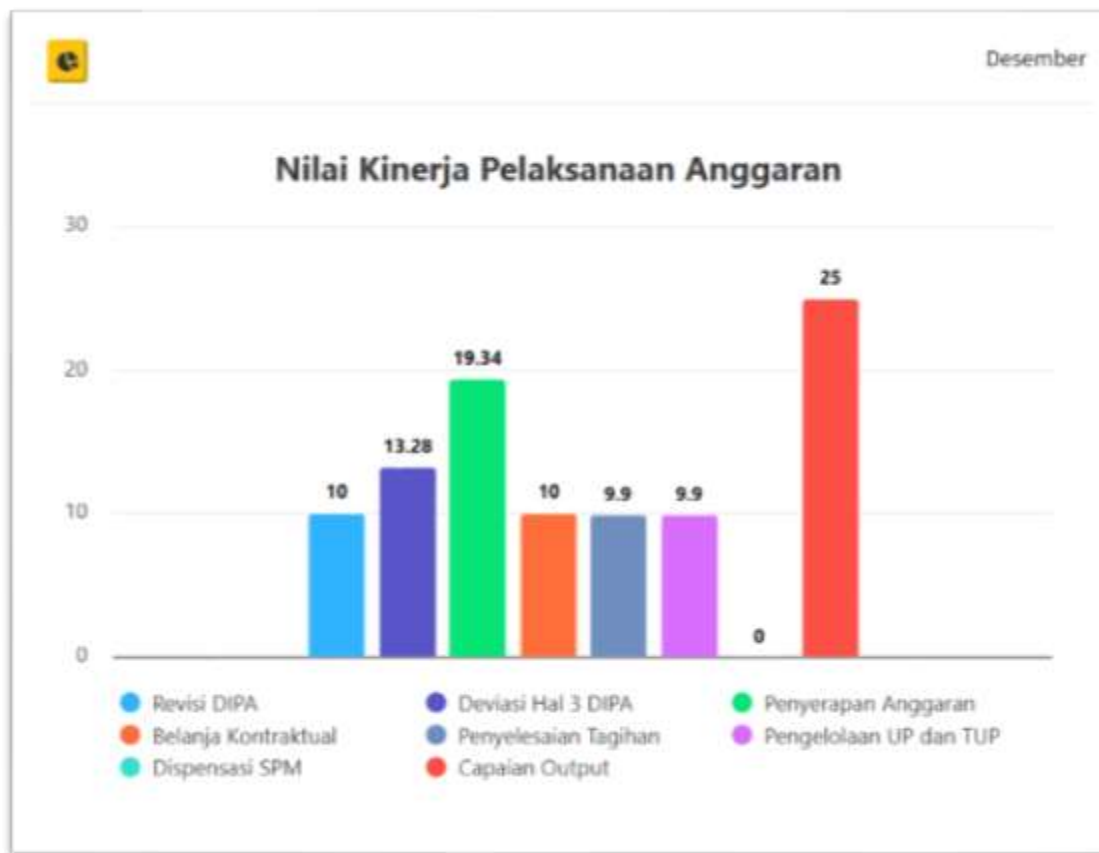
Tabel 23 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi 2024

Keterangan	Efektivitas		Efisiensi	
	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
Bobot	30%	45%	10%	15%
Nilai	100	100	20	6,75
Nilai Akhir	30	45	2	1,0125
NK Perencanaan Anggaran	78,0125			

3.2.2 NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan aplikasi SMART, diperoleh nilai IKPA sebagai berikut:



Gambar 11 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sehingga diperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

Tabel 24 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

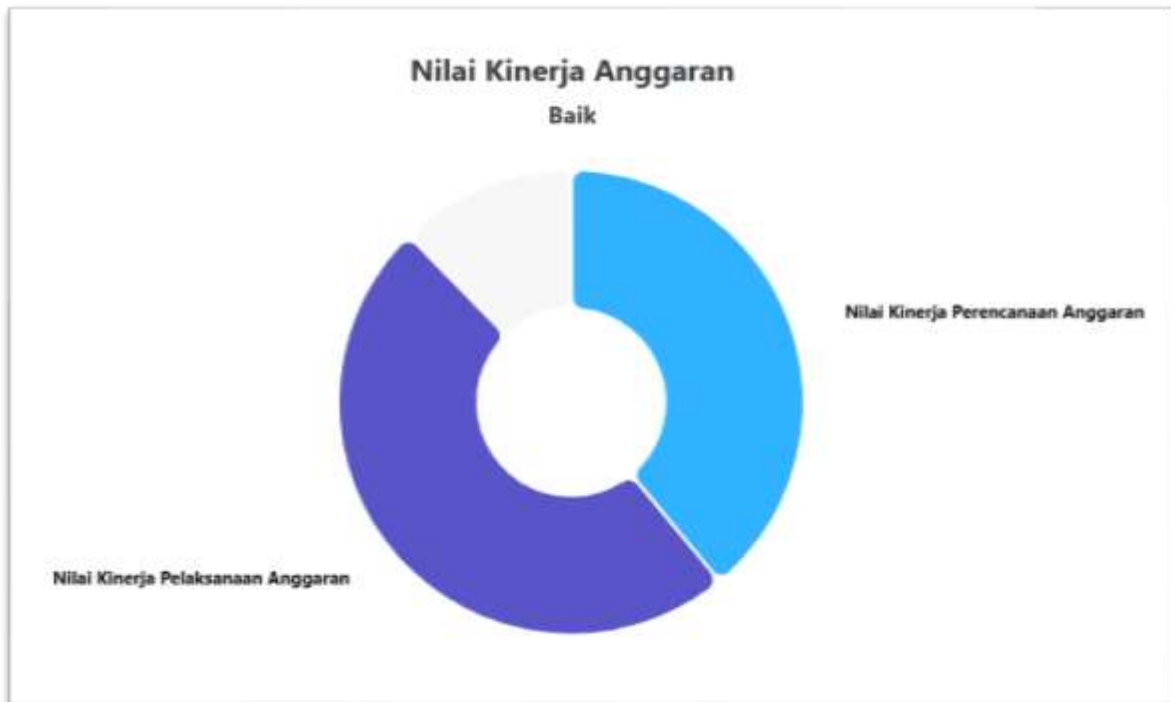
Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100	88,51	96,71	100	98,95	98,97	100	97,41
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	10	13,28	19,34	10	9,9	9,9	25	
Nilai Aspek	94.26		98.66				100.00	
Konversi Bobot	100%							
Dispensasi SPM (Pengurang)	0.00							
Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)	97.41							

Berdasarkan perhitungan kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, maka diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

Tabel 25 Nilai Kinerja Anggaran

Keterangan	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran
Nilai	78,01	97,41
Bobot	50%	50%
Nilai Akhir	39,005	48,705
Nilai Kinerja Anggaran	87,71	

Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi sebesar **87,71%** termasuk kategori **Baik**.



Gambar 12 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

Sumber : Aplikasi SMART 14 Januari 2025

3.3 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

3.3.1 PENGHARGAAN

3.3.1.1 PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Pada hari Rabu, 11 Desember 2024 bertempat di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan (Jl. Medan Merdeka Barat No.8) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi mendapat Kategori Informatif dengan Nilai 93,6 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024.





Gambar 13 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

3.3.1.2 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI MELUNCURKAN E-LIBRARY TERINTEGRASI

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) meluncurkan Integrasi E-Library dan Logo Perpustakaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan pada tanggal 8 Oktober 2024. peluncuran Perpustakaan Digital atau E-Library Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang transportasi serta memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.



Gambar 14 Peluncuran E-Library Terintegrasi

3.3.2 KERJASAMA

Badan Kebijakan Transportasi melakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Selain untuk menunjang penyusunan rekomendasi kebijakan, hal tersebut dilakukan agar rekomendasi kebijakan yang dilakukan lebih tepat guna.

Tabel 26 Kerjasama Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

TAHUN	MITRA	NOMOR	TENTANG	LINGKUP KERJASAMA	MASA BERLAKU
2022 (AGUSTUS)	AirNav Indonesia	HK.201/1/ 21/BLT/20 22	Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan	1. kerja sama analisis dan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 2. kerja sama peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait kebijakan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan; 3. kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	5 TAHUN

TAHUN	MITRA	NOMOR	TENTANG	LINGKUP KERJASAMA	MASA BERLAKU
2022 (OKTOBER)	PT. PAL Indonesia	KL.002/01/ 01/BKT/20 22	Analisis Teknis Bidang Pelayaran	1. analisis teknis dan rekomendasi bidang pelayaran; 2. peningkatan kompetensi dan keahlian terkait penyelenggaraan pelayaran; 3. pertukaran dan pemanfaatan data, teknologi dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.	2 TAHUN
2023 (MARET)	Institut Teknologi Bandung	HK.201/01 /08/BKT/2 023	Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi	1. kerja sama penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi; 2. kerja sama pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh PARA PIHAK; 3. kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana; 6. kerja sama publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar; 7. kerja sama implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); 8. kerja sama praktisi mengajar; 9. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	5 TAHUN
2023 (MARET)	Universita s Hasanudd in	HK.201/01 /09/BKT/2 023	Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi	1. kerja sama penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi; 2. kerja sama pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh PARA PIHAK;	5 TAHUN

TAHUN	MITRA	NOMOR	TENTANG	LINGKUP KERJASAMA	MASA BERLAKU
				3. kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kerja sama pemanfaatan sarana dan prasarana; 6. kerja sama publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar; 7. kerja sama implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); 8. kerja sama praktisi mengajar; 9. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	
2023 (AGUSTUS)	PT. Angkasa Pura II	HK.201/01/12/BKT/2023	Penyelenggaraan Analisis dan Pemeberian Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi Udara	1. penyelenggaraan kajian dalam pemberian rekomendasi kebijakan transportasi udara; 2. penyediaan dan pertukaran tenaga ahli; 3. peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk magang dan/atau pertukaran sumber daya manusia; 4. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi; 5. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau workshop; 6. penulisan jurnal ilmiah; 7. kolaborasi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; dan/atau 8. kegiatan lain yang dibutuhkan dan disepakati oleh PARA PIHAK;	5 TAHUN
2023 (OKTOBER)	KOMPAS	SOP - SETBAN 2 TAHUN 2023	Penyelenggaraan Analisis dan Evaluasi Kebijakan Bidang Transportasi	1. penyelenggaraan analisis dan evaluasi kebijakan Kementerian Perhubungan dalam bidang transportasi; 2. pengembangan sumber daya manusia; 3. penyelenggaraan publikasi dan kolaborasi penerbitan informasi hasil	5 TAHUN

TAHUN	MITRA	NOMOR	TENTANG	LINGKUP KERJASAMA	MASA BERLAKU
				analisis dan evaluasi kebijakan bidang transportasi; 4. penyelenggaraan kegiatan bidang kepastakaan; 5. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	
2023 (DESEMBER)	TELKOMSEL	HK.201/01/19/BKT/2023	Penyelenggaraan Data Pergerakan di Bidang Transportasi	1. penyelenggaraan data pergerakan di bidang transportasi termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan survei, pendeteksian, pengolahan, analisa dan penyajian data pergerakan manusia berdasarkan big data serta layanan Telkomsel Enterprise; 2. transfer knowledge dan pemanfaatan teknologi informasi; 3. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.	3 TAHUN
2024 (JANUARI)	Universitas Padjajaran	HK.201/01/03/BKT/2024	Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi	1. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi; 2. pemanfaatan tenaga ahli; 3. peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penulisan jurnal ilmiah; 6. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau workshop; 7. peningkatan perpustakaan; dan 8. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	5 TAHUN
2024 (FEBRUARI)	Universitas Airlangga	HK.201/01/05/BKT/2024	Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi	1. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi; 2. pemanfaatan tenaga ahli; 3. peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. pemanfaatan data	5 TAHUN

TAHUN	MITRA	NOMOR	TENTANG	LINGKUP KERJASAMA	MASA BERLAKU
				dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. penulisan jurnal ilmiah; 6. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau workshop; 7. peningkatan perpustakaan; dan 8. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	
2024 (MARET)	Universitas Andalas	HK.201/01/10/BKT/2024	Penyelenggaraan Analisis dan Pemberian Rekomendasi Kebijakan Transportasi	1. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi; 2. pemanfaatan dan/atau pertukaran tenaga ahli yang dimiliki oleh PARA PIHAK; 3. peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pemanfaatan sarana dan prasarana; 6. publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, dan seminar; 7. implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); 8. praktisi mengajar; 9. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum.	5 TAHUN
2024 (JUNI)	Universitas Diponegoro	HK.201/01/19/BKT/2024	Perumusan Kebijakan Transportasi dalam Pengembangan di Bidang Transportasi	1. pengembangan metode dan alih pengetahuan dalam penyusunan kebijakan di bidang transportasi; 2. penyediaan dan pertukaran tenaga ahli dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi; 3. pengembangan Knowledge Management System untuk mendukung penyusunan kebijakan	5 TAHUN

TAHUN	MITRA	NOMOR	TENTANG	LINGKUP KERJASAMA	MASA BERLAKU
				yang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan; dan 4. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	
2024 (OKTOBER)	Masyarakat Transportasi Indonesia	HK.201/02/16/BKT/2024	Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi	1. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi; 2. pertukaran tenaga ahli; 3. peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. pertukaran data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau workshop; dan 6. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	5 TAHUN
2024 (OKTOBER)	MIROS MALAYSIA		The Policy Analysis and Recommendation on Road Safety	1. kolaborasi dan pengembangan kapasitas dan pertukaran tenaga ahli; 2. konsultasi dan kolaborasi dalam kegiatan analisis dan rekomendasi kebijakan; 3. pengembangan program, termasuk program bersama untuk mempromosikan keselamatan jalan; dan 4. ruang lingkup kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.	5 TAHUN

3.4 ANALISIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2024

3.4.1 REALIASI ANGGARAN TAHUN 2024

Kondisi perkembangan pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi selama periode RENSTRA 2022 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27 Perkembangan Pagu Anggaran 2022-2023

TAHUN	2022	2023	2024
Target	97.299.623.000	161.130.813.000	196.457.340.000
Realisasi	97.096.874.442	160.979.807.637	188.043.279.980
Sisa Anggaran	202.748.558	151.005.363	8.414.060.020
Daya Serap	99,79%	99,91%	95,72%

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kebijakan Transportasi, 2024

Berdasarkan data perkembangan pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi tersebut, terlihat pagu anggaran cenderung mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan realisasi anggaran yang juga meningkat.

Jika dibandingkan dengan target tahun ini, realisasi anggaran masih belum mencapai target. Capaian anggaran tahun 2024 sebesar 95,72%, sedangkan target realisasi anggaran sebesar 99,20%. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 15 Target dan Realisasi Anggaran 2024

3.4.2 ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP TAHUN 2024

Capaian daya serap anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 tercatat sebesar 95,72% atau Rp188.043.279.980,00. Sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp8.414.060.020,00 (3,48%). Nilai persentase daya serap tersebut menunjukkan secara keseluruhan penyerapan anggaran sudah baik. Adapun *output* secara fisik yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% untuk semua kegiatan. Realisasi daya serap Badan Kebijakan Transportasi tahun 2024 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 28 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2024

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
Belanja Pegawai	41.936.254.000	41.488.904.048	98,93%
Belanja Barang	147.709.606.000	139.746.630.921	94,61%
Belanja Modal	6.811.480.000	6.807.745.011	99,95%
TOTAL	196.457.340.000	188.043.279.980	95,72%

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. 2024

Berdasarkan tabel tersebut, pagu tidak terserap berasal dari Belanja Pegawai, yaitu sebesar 1,07% atau Rp447.349.952,00 dari pagu sebesar Rp41.936.254.000,00. Dengan deviasi sebesar 1,07%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran sudah baik, dan juga dapat disimpulkan bahwa besaran target dan realisasi cenderung sama. Adanya deviasi antara target dan realisasi belanja pegawai dikarenakan kenaikan tunjangan kinerja pegawai tahun 2024 tidak terealisasi.

Adapun untuk Belanja Barang telah terserap sebesar 94,61% dari pagu sebesar Rp147.709.606.000,00. Deviasi sebesar Rp7.962.975.079,00 dikarenakan adanya blokir anggaran, sehingga tidak dapat direalisasikan.

Belanja Modal telah terserap baik dengan daya serap sebesar 99,95% atau terserap sebesar Rp6.807.745.011,00 dari pagu Rp6.811.480.000,00. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengadaan sarana dan prasarana dapat direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran.

Berdasarkan data capaian daya serap per-program kegiatan Badan Kebijakan Transportasi (tingkat Eselon II). Realisasi tertinggi untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi sebesar 97,22% dan terendah pada kegiatan di Pusat Kebijakan Prasarana dan Transportasi Intermoda sebesar 93,01%. Data rinci capaian daya serap kegiatan Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan program kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 29 Capaian Daya Serap Per-Satuan Kerja Tahun 2024

No.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	103.666.414.000	100.780.613.221	97,22%
2	Pusat Kebijakan Sarana	21.029.863.000	20.002.601.094	95,12%
3	Pusat Kebijakan Prasarana dan Integrasi Moda	23.033.375.000	21.422.312.418	93,01%
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan	27.701.988.000	25.992.217.844	93,83%

No.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
5	Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi	21.025.700.000	19.845.535.403	94,39%
TOTAL		196.457.340.000	188.043.279.980	95,72%

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kebijakan Transportasi 2024

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2024:

- 1) Komitmen Bersama Pimpinan dan Seluruh Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja anggaran;
- 2) Melakukan optimalisasi anggaran;
- 3) Mengawal rencana penarikan dana sesuai jadwal;
- 4) Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pembayaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun RENSTRA sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sebagai organisasi baru, Badan Kebijakan Transportasi telah menyesuaikan indikator kinerja sesuai dengan RENSTRA, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Dengan adanya monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara rutin, diharapkan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat teridentifikasi dan diperoleh solusinya.

Adapun kendala yang ditemukan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Adanya perubahan skema kerjasama kegiatan hal ini menyebabkan *timeline* kegiatan menjadi mundur;
- b. Proses lelang yang memakan waktu cukup lama sehingga perlu adanya penyesuaian target waktu penyusunan rekomendasi;
- c. Adanya perubahan pimpinan menyebabkan perubahan kebijakan dalam proses pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan;
- d. Kurangnya koordinasi proses penyusunan rekomendasi kebijakan di tahap *agenda setting* dan tahap akhir sehingga menyebabkan *mis persepsi* antara pimpinan dan PIC penyusunan rekomendasi kebijakan;
- e. Target realisasi anggaran belum tercapai karena adanya perbedaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, seperti kenaikan tunjangan kinerja yang direncanakan tidak terealisasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 berdasarkan target capaian pada sasaran program dan indikator kinerja masih berproses dalam memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Pencapaian kinerja rata-rata Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 terhadap indikator kinerja program bila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu sebesar **105,345**. Secara rinci capaian kinerja untuk sasaran strategis dan masing-masing indikator kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 30 Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja
SP 1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	65	61,464	94,560
	IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	90	100,000	111,111
	IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	32	35,135	109,797
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Program 1					105,156
SP 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	80,5	85.260*	105,913
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Program 2					105,913
Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi TA 2024					105,345

2. Realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp188.043.279.980,00** dengan pagu sebesar Rp196.457.340.000,00 sehingga diperoleh capaian anggaran sebesar **95,72%**. Adapun rincian realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi didominasi oleh belanja barang sebesar

Rp139.746.630.921,00, belanja pegawai yaitu sebesar Rp41.488.904.048,00 dan belanja modal sebesar Rp6.807.745.011,00, sesuai dengan lampiran 8. Apabila dibandingkan dengan target 2024, capaian anggaran saat ini masih belum memenuhi target, akan tetapi jika nilai persentase daya serap tersebut menunjukkan secara keseluruhan penyerapan anggaran sudah baik.

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Beberapa identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan agar target kinerja yang terdapat dalam PK dapat tercapai yaitu sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan Triwulan IV sudah baik, Hal ini perlu menjadi perhatian dan perlu adanya strategi yang berdampak signifikan IKP tersebut. Tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya percepatan proses penyusunan kebijakan berupa finalisasi surat ke Menhub/stakeholder terkait, pemantapan proses agenda *setting* rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan secara paralel satu rekomendasi kebijakan dengan rekomendasi kebijakan lainnya, dan pembagian tim kerja analisis data, serta percepatan dilakukan *public hearing* draft kebijakan kepada *stakeholder* terkait;
2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Kebijakan Transportasi sudah relative bagus. Agar NKA setiap tahunnya konsisten bagus, dalam menilai kinerja anggaran Badan Kebijakan Transportasi, peran nilai kinerja unit kerja eselon 2 sangatlah besar. Sehingga perlu adanya peningkatan nilai kinerja melalui peningkatan efisiensi yang diiringi dengan CRO (Capaian Rincian Output) dan penyesuaian RPD (Rencana Penarikan Dana) dengan data realisasi anggaran. Dalam meningkatkan nilai CRO, perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pencapaian RO di lapangan dan melaporkan capaian RO secara disiplin dan akurat dalam aplikasi SAS/SAKTI atau SMART;
3. Pelaksanaan anggaran TA. 2024 perlu dilakukan monitoring secara detail dengan menggunakan pendekatan karakteristik output kegiatan, untuk memastikan pergeseran alokasi anggaran antar output tetap sejalan dengan target kinerja yang tertuang didalam Renja/PK;
4. Penyusunan jadwal kegiatan yang terencana dan dimonitor secara periodik, sehingga pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan tetap sesuai target waktu dan penganggaran.

LAMPIRAN 1. CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

IKP	Satker	Target PK	Volume	Realisasi Volume	Realisasi	% Capaian thd PK	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran thd Pagu
IKP 1	PUSJAK SARANA	65	2.000	-	0.000	-	8,966,375,000.00	2,234,668,195.00	24.923%
IKP 1	PUSJAK PTIM	65	2.000	-	0.000	-	9,501,229,000.00	2,016,931,269.00	21.228%
IKP 1	PUSJAK LLATP	65	3.000	-	0.000	-	6,741,874,000.00	250,891,356.00	3.721%
IKP 1	PUSJAK KKT	65	2.000	-	0.000	-	9,599,100,000.00	1,030,432,069.00	10.735%
IKP 1	BKT	65	9.000	0.000	0.000	-	34,808,578,000.00	5,532,922,889.00	15.895%
IKP 2	PUSJAK SARANA	90	15.000	1.000	6.667	7.407	9,484,682,000.00	808,940,888.00	8.529%
IKP 2	PUSJAK PTIM	90	15.000	2.190	14.600	16.222	12,154,394,000.00	829,565,132.00	6.825%
IKP 2	PUSJAK LLATP	90	15.000	0.650	4.333	4.815	18,800,830,000.00	677,285,762.00	3.602%
IKP 2	PUSJAK KKT	90	14.000	1.210	8.643	9.603	8,365,603,000.00	585,618,943.00	7.000%
IKP 2	BKT	90	59.000	5.050	8.559	9.510	48,805,509,000.00	2,901,410,725.00	5.945%
IKP 3	PUSJAK SARANA	32	6.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK PTIM	32	13.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK LLATP	32	17.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK KKT	32	6.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	BKT	32	42.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 4	SETBADAN	80.5	0.000	0.000	-	-	97,820,829,000.00	20,425,120,909.00	20.880%
IKP 4	PUSJAK SARANA	80.5	0.000	0.000	-	-	3,823,806,000.00	971,412,751.00	25.404%
IKP 4	PUSJAK PTIM	80.5	0.000	0.000	-	-	3,566,395,000.00	894,827,474.00	25.091%
IKP 4	PUSJAK LLATP	80.5	0.000	0.000	-	-	3,984,364,000.00	563,580,761.00	14.145%
IKP 4	PUSJAK KKT	80.5	0.000	0.000	-	-	3,647,859,000.00	821,095,334.00	22.509%
IKP 4	BKT	80.5	0.000	-	-	-	112,843,253,000.00	23,676,037,229.00	20.981%
TOTAL							196,457,340,000.00	32,110,370,843.00	16.345%

LAMPIRAN 2. CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

IKP	Satker	Target PK	Volume	Realisasi Volume	Realisasi	% Capaian thd PK	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran thd Pagu
IKP 1	PUSJAK SARANA	65	2.000	-	0.000	-	8,966,375,000.00	5,524,424,532.00	61.613%
IKP 1	PUSJAK PTIM	65	2.000	-	0.000	-	9,501,229,000.00	5,882,285,197.00	61.911%
IKP 1	PUSJAK LLATP	65	3.000	-	0.000	-	6,741,874,000.00	2,881,647,907.00	42.743%
IKP 1	PUSJAK KKT	65	2.000	-	0.000	-	9,599,100,000.00	3,906,096,704.00	40.692%
IKP 1	BKT	65	9.000	0.000	0.000	-	34,808,578,000.00	18,194,454,340.00	52.270%
IKP 2	PUSJAK SARANA	90	15.000	4.750	31.667	35.185	9,484,682,000.00	2,238,353,582.00	23.600%
IKP 2	PUSJAK PTIM	90	15.000	5.500	36.667	40.741	12,154,394,000.00	5,188,388,112.00	42.687%
IKP 2	PUSJAK LLATP	90	15.000	3.150	21.000	23.333	18,800,830,000.00	2,438,072,763.00	12.968%
IKP 2	PUSJAK KKT	90	14.000	4.530	32.357	35.952	8,365,603,000.00	2,419,836,600.00	28.926%
IKP 2	BKT	90	59.000	17.930	30.390	33.766	48,805,509,000.00	12,284,651,057.00	25.171%
IKP 3	PUSJAK SARANA	32	6.000	1.000	16.667	52.083	-	-	-
IKP 3	PUSJAK PTIM	32	13.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK LLATP	32	17.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK KKT	32	6.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	BKT	32	42.000	1.000	2.500	7.813	-	-	-
IKP 4	SETBADAN	80.5	0.000				97,820,829,000.00	44,317,487,263.00	45.305%
IKP 4	PUSJAK SARANA	80.5	0.000				3,823,806,000.00	2,065,140,918.00	54.007%
IKP 4	PUSJAK PTIM	80.5	0.000				3,566,395,000.00	1,654,265,816.00	46.385%
IKP 4	PUSJAK LLATP	80.5	0.000				3,984,364,000.00	1,538,209,291.00	38.606%
IKP 4	PUSJAK KKT	80.5	0.000				3,647,859,000.00	1,437,342,002.00	39.402%
IKP 4	BKT	80.5	0.000		77,45*	96,211	112,843,253,000.00	51,012,445,290.00	45.206%
TOTAL							196,457,340,000.00	81,491,550,687.00	41,481

*Indeks RB TA 2023

LAMPIRAN 3. CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

IKP	Satker	Target PK	Volume	Realisasi Volume	Realisasi	% Capaian thd PK	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran thd Pagu
IKP 1	PUSJAK SARANA	65	2.000	2.000	0.000	0.000	7,022,375,000.00	7,317,971,259.00	104.209%
IKP 1	PUSJAK PTIM	65	2.000	2.000	0.000	0.000	7,489,476,000.00	6,868,924,111.00	91.714%
IKP 1	PUSJAK LLATP	65	2.000	2.000	0.000	0.000	6,741,874,000.00	4,463,591,451.00	66.207%
IKP 1	PUSJAK KKT	65	2.000	2.000	0.000	0.000	9,247,710,000.00	7,367,588,973.00	79.669%
IKP 1	BKT	65	8.000	8.000	0.000	0.000	30,501,435,000.00	26,018,075,794.00	85.301%
IKP 2	PUSJAK SARANA	90	13.000	5.075	39.038	43.376	9,134,682,000.00	5,196,879,475.00	56.892%
IKP 2	PUSJAK PTIM	90	16.000	9.710	60.688	67.431	11,977,504,000.00	8,550,138,666.00	71.385%
IKP 2	PUSJAK LLATP	90	17.000	5.650	33.235	36.928	16,975,750,000.00	11,620,994,115.00	68.456%
IKP 2	PUSJAK KKT	90	19.000	10.000	52.632	58.480	8,130,131,000.00	5,398,165,943.00	66.397%
IKP 2	BKT	90	65.000	30.435	46.823	52.026	46,218,067,000.00	30,766,178,199.00	66.567%
IKP 3	PUSJAK SARANA	32	6.000	1.000	16.667	52.083	-	-	-
IKP 3	PUSJAK PTIM	32	11.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK LLATP	32	17.000	1.000	5.882	18.382	-	-	-
IKP 3	PUSJAK KKT	32	6.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
IKP 3	BKT	32	40.000	2.000	5.000	15.625	-	-	-
IKP 4	SETBADAN	80.5	0.000	0.000	-	-	103,666,414,000.00	70,135,060,235.00	67.655%
IKP 4	PUSJAK SARANA	80.5	0.000	0.000	-	-	4,872,806,000.00	2,938,348,988.00	60.301%
IKP 4	PUSJAK PTIM	80.5	0.000	0.000	-	-	3,566,395,000.00	2,497,979,840.00	70.042%
IKP 4	PUSJAK LLATP	80.5	0.000	0.000	-	-	3,984,364,000.00	2,589,470,511.00	64.991%
IKP 4	PUSJAK KKT	80.5	0.000	0.000	-	-	3,647,859,000.00	2,352,406,101.00	64.487%
IKP 4	BKT	80.5	0.000	-	85.260	105.913	119,737,838,000.00	80,513,265,675.00	67.241%
TOTAL						43.391	196,457,340,000.00	137,297,519,668.00	69.887%

*Indeks RB TA 2023

LAMPIRAN 4. CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

IKP	Satker	Target PK	Volume	Realisasi Volume	Realisasi	% Capaian thd PK	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran thd Pagu
IKP 1	PUSJAK SARANA	65	2.000	2.000	69.051	106.232	7,022,375,000.00	8,068,283,396.00	114.894%
IKP 1	PUSJAK PTIM	65	2.000	2.000	63	96.923	7,489,476,000.00	7,379,561,651.00	98.532%
IKP 1	PUSJAK LLATP	65	2.000	2.000	64.898	99.843	6,741,874,000.00	5,579,250,104.00	82.755%
IKP 1	PUSJAK KKT	65	2.000	2.000	48.908	75.243	9,247,710,000.00	8,753,656,937.00	94.658%
IKP 1	BKT	65	8.000	8.000	61.46425	94.56038462	30,501,435,000.00	29,780,752,088.00	97.637%
IKP 2	PUSJAK SARANA	90	13.000	13.000	100.000	111.111	9,134,682,000.00	8,191,188,511.00	89.671%
IKP 2	PUSJAK PTIM	90	15.000	15.000	100.000	111.111	11,977,504,000.00	10,623,621,521.00	88.696%
IKP 2	PUSJAK LLATP	90	16.000	16.000	100.000	111.111	16,975,750,000.00	16,509,502,539.00	97.253%
IKP 2	PUSJAK KKT	90	20.000	20.000	100.000	111.111	8,130,131,000.00	7,630,431,231.00	93.854%
IKP 2	BKT	90	63.000	63,000	100,000	111,111	46,218,067,000.00	42,954,743,802.00	92.939%
IKP 3	PUSJAK SARANA	32	10.000	3.000	30.000	93.750	-	-	-
IKP 3	PUSJAK PTIM	32	11.000	4.000	36.364	113.636	-	-	-
IKP 3	PUSJAK LLATP	32	10.000	4.000	40.000	125.000	-	-	-
IKP 3	PUSJAK KKT	32	6.000	2.000	33.333	104.167	-	-	-
IKP 3	BKT	32	37.000	13.000	35.135	109.797	-	-	-
IKP 4	SETBADAN	80.5	0.000	0.000	-	-	103,666,414,000.00	100,780,613,221.00	97.216%
IKP 4	PUSJAK SARANA	80.5	0.000	0.000	-	-	4,872,806,000.00	3,743,129,187.00	76.817%
IKP 4	PUSJAK PTIM	80.5	0.000	0.000	-	-	3,566,395,000.00	3,419,129,246.00	95.871%
IKP 4	PUSJAK LLATP	80.5	0.000	0.000	-	-	3,984,364,000.00	3,903,465,201.00	97.970%
IKP 4	PUSJAK KKT	80.5	0.000	0.000	-	-	3,647,859,000.00	3,461,447,235.00	94.890%
IKP 4	BKT	80.5	0.000	-	85.260	105.913	119,737,838,000.00	115,307,784,090.00	96.300%
TOTAL						105,345	196,457,340,000.00	188,043,279,980.00	95.717%

*Indeks RB TA 2023

LAMPIRAN 5. REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TELAH TERKONFIRMASI KEMANFAATANNYA (T-2)

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM / PM)	Kemanfaatan
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi					
1	Evaluasi Pelaksanaan IM Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Angkutan Penyeberangan	1. Pelabuhan Ajibata – Ambarita 2. Pelabuhan Simanindo –Tigaras 3. Pelabuhan Merak – Bakauheni 4. Pelabuhan Ketapang –Gilimanuk 5. Pelabuhan Padangbai -Lembar	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Surat Itjen No.PS.303/2/11/ITJE N/2004 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Angkutan Penyeberangan	Pengalihan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang ditindaklanjuti menjadi IM No 9 Tahun 2024
2	Rekomendasi Kebijakan Penataan Terus/TUKS	1. Jakarta (Rapat Monitoring Kemanfaatan)	1. Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Berita Acara Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	1) Telah di keluarkannya IM 1 Tahun 2023 tentang penertiban aktifitas kepelabuhanan yang tidak memenuhi legalitas di bidang kepelabuhanan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan; 2) Telah dilaksanakan pengawasan olah gerak kapal oleh KSOP/UPP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 8 Tahun 2024 Tentang Standarisasi Pelayanan Pelabuhan; 3) Selain itu sebagai langkah peningkatan pengawasan telah dikeluarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.305/35/13/DJPL/2024 terkait pelaksanaan pemenuhan pemasangan Kamera Closed Circuit Television (CCTV) dan Sistem Penerima Automatic Identification System (AIS Receiver) di Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri; 4) Sebagai bentuk peningkatan koordinasi dengan instansi terkait Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Keputusan Nomor A.963/AL.308/DJPL tentang penerapan pemasangan papan informasi legalitas perizinan berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum; 5) Saat ini sedang dilakukan revisi PP 15 Tahun 2016 tentang jenis dan

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
					tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Prosesnya masih dalam harmonisasi dengan Kementerian Keuangan.
3.	Rekomendasi Kebijakan Potensi Lost PNBPNP Pengangkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Pelabuhan Penyeberangan	1. Jakarta (Rapat Monitoring Kemanfaatan)	KSOP GILIMANUK	Berita Acara Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui PNBPNP pengangkutan bahan berbahaya dan beracun pada Pelabuhan Gilimanuk telah diterima dan rekomendasi telah dilaksanakan yaitu Penerbitan dan Pembayaran Billing tagihan Jasa Angkutan Laut (PUP 9).
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda					
1.	Potensi Penerapan Land Value Capture dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi	Jakarta	DJKA, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) Kemenko Perekonomian	Perpres Nomor 74 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK)	1) Saat ini, KPIP tengah merancang PerMenko yang mengatur petunjuk teknis yang merupakan peraturan turunan dari Perpres sebagai acuan pelaksanaannya. Diharapkan, Kemenhub juga dapat memberikan masukan terhadap rancangan PerMenko tersebut; 2) Perlu adanya kesepakatan bersama terkait implementasi LVC sebagai Creative Financing di seluruh subsektor, tidak hanya di Ditjen Perkeretaapian; 3) Yang perlu dicermati adalah pengelolaan dana LVC termasuk skema proporsi penggunaan dana serta bentuk nyata pemanfaatan dana, apakah untuk pengembangan infrastruktur itu sendiri atau seluruhnya akan kembali menjadi pendapatan daerah; 4) Perlu ada turunan peraturan yang tegas dan mengikat untuk

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
					mengatur implementasi LVC termasuk sanksi apabila tidak melaksanakannya.
2.	Kebijakan Pemanfaatan Sustainable Aviation Fuel di Sektor Transportasi Udara	Jakarta	DKUPPU	Surat Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Nomor UM.209/19/5/DKPPU -2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Tanggapan DKUPPU terhadap Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan T-2	1) Peta Jalan baru nantinya akan dicantumkan dalam revisi Peraturan ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Poin yang disesuaikan seperti target implementasi campuran SAF sebesar 1% pada tahun 2027; 2) Untuk mengatasi isu sustainability dari feedstock sebelumnya, Pertamina akan menggunakan UCO sebagai bahan baku SAF. Pertamina akan membangun kilang di Cilacap dan Plaju untuk mendukung target implementasi SAF di tahun 2027 tersebut.
3.	Pembiayaan Kreatif dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Idle Bandar Udara	Banten	Bandar Udara Budiarto Banten	Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Budiarto Nomor PL.202/1/6/UPBU-RTO-2024 tanggal 18 November 2024 tentang TanggapanUPBU Budiarto terhadap Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan T-2	1) Sebagai Bandar udara umum, Budiarto terus mengoptimalkan pelayanan dan peluang bisnis baik dari sisi aeronautical dan nonaeronautical. Saat ini, tidak ada aset yang bersifat Idle di UPBU Budiarto, dimana telah dilakukan optimalisasi seperti pelayanan penerbangan charter, pembangunan MRO, edukasi/ wisata transportasi udara, penyewaan hanggar/ ruangan/ lahan, dan lainnya; 2) Untuk tarif sewa yang dikenakan cukup rendah dengan mengacu kepada PP No.15 Tahun 2016 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dan appraisal dari KPKN; 3) Terdapat pembangunan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) meliputi fasilitas hanggar, workshop, gudang, engineshop, dan perkantoran melalui skema KSP lahan sebesar 16.000 m2 dengan jangka waktu 30 tahun; 4) Kendala yang dihadapi oleh UPBU Budiarto adalah proses menuju Badan Layanan Umum (BLU) dimana syarat minimal pendapatan belum dapat terpenuhi.

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
4.	Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara terhadap Peningkatan Demand Angkutan Udara	Jakarta	DKUPPU	Surat Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Nomor UM.209/19/5/DKPPU -2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Tanggapan DKUPPU terhadap Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan T-2	1) Pemerintah telah berupaya tidak memberikan beban pembiayaan yang tinggi untuk maskapai nasional dapat beroperasi seperti biaya navigasi, bandar udara, dan lainnya; 2) Perlu adanya evaluasi terhadap pemberian slot time dan analisis demand penumpang terhadap rute-rute penerbangan favorit; 3) Saat ini maskapai penerbangan masih berjuang untuk survive di industry penerbangan, jumlah pesawat yang beroperasi masih setengah dari total pesawat sebelum Covid-19.
Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan					
1	Survei Online Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023	Nasional	Menteri Perhubungan, Direktorat Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan, operator transportasi, dan stakeholder terkait	1. Surat Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor UM.209/30/16/BPTJ/2024 2. Media Massa https://portal.dephub.go.id/post/read/44,7-juta-orang-diprediksi-bepergian,-kemenhub-siapkan-penyelenggaraan-angkutan-natal-dan-tahun-baru-dengan-matang	Hasil Survei Online Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, dipergunakan oleh Menteri Perhubungan (Bapak Budi Karya Sumadi) dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022. Hasil survei tersebut digunakan Direktorat Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya dalam mempersiapkan kebijakan dan mitigasi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Adapun kebijakan dan mitigasi yang telah disiapkan pada masa Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 sebagai berikut: 1. Telah disiapkan 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan 4 divre, 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga Movable Bridge, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan, juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara; 2. Sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum yang diantaranya pembatasan angkutan barang tertentu kecuali Angkutan Logistik Sembako, imbauan penerapan protokol kesehatan, dan lain sebagainya;

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
					3. Ramp check kelaikan sarana dan prasarana transportasi; 4. Manajemen rekayasa lalu lintas pada jalan tol maupun non tol dan pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19 .
2	Tarif Langganan Bagi Pelajar/Mahasiswa Untuk Meningkatkan Okupansi dan Layanan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1. Nota Dinas Kepala Bidang Kebijakan Transportasi Perkotaan Nomor: 543/KTP/VII/2024 2. Media Massa https://djka.dephub.go.id/lrt-sumsel-restock-kartu-berlangganan-hadirkan-tarif-khusus-untuk-pelajar-mahasiswa-lansia-dan-asn#:~:text=Tarif%20Berlangganan%20untuk%20Semua%20Klangan,%3A%20Rp150.000%20per%20bulan.	1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, telah menetapkan tarif langganan LRT yang ekonomis dan berkelanjutan untuk memastikan aksesibilitas bagi masyarakat; 2. Subsidi atau diskon tarif diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu seperti pelajar dan pekerja berpenghasilan rendah; 3. Tarif perintis LRT Sumatera Selatan sebesar Rp 5.000 dari dan menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Sedangkan Rp 10.000 untuk rute stasiun awal sampai dengan stasiun akhir; 4. Untuk mendapatkan tarif langganan, masyarakat perlu mendaftar di loket-loket stasiun LRT Sumatera Selatan dengan membawa kartu identitas atau kartu pelajar/mahasiswa. Masyarakat yang telah mendaftar akan mendapatkan kartu berlangganan dan mendapatkan tarif langganan sebagai berikut: a. Pelajar dan Mahasiswa: Rp25.000 per bulan. b. Lansia (usia 60 tahun ke atas): Rp50.000 per bulan. c. ASN: Rp150.000 per bulan. d. Masyarakat Umum: Rp175.000 per bulan. 5. Dengan adanya tarif berlangganan, masyarakat merasa terbantu khususnya pelajar, mahasiswa, dan lansia karena tarif yang dibayarkan lebih terjangkau
3	Policy Brief Transportasi Perkotaan	Nasional	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan	1. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: UM.209/26/11/STJ/2024 2. Media Massa	1. Telah diterbitkan urut Menteri Sekretariat Negara Nomor B-984/M/D-1/HK.03.00/10/2023 tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yang salah satunya memuat transformasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjadi Direktorat Jenderal Integrasi

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
				https://www.mobilitas.id/bptj-dihapus-dan-diganti-ditjen-integrasi-transportasi-initujuannya/#google_vignette	Transportasi dan Multimoda (DITM); 2. Dasar transformasi tersebut dikarenakan integrasi dan konektivitas transportasi massal selama ini belum optimal yang disebabkan belum adanya unit kerja setingkat Eselon I yang fokus menangani konektivitas dan integrasi; 3. Dengan adanya transformasi BPTJ menjadi DITM, diharapkan dapat mendorong konektivitas antar moda transportasi massal; 4. DITM diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terlibat dalam konektivitas dan integrasi transportasi massal.
4	Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Buy The Service (BTS)	1. Teman Bus Kota Makassar – Trans Mamminasata (Pelaksanaan Uji Petik Kemanfaatan T-2) 2. Teman Bus Kota Yogyakarta – Trans Jogja 3. Teman Bus Kabupaten Banyumas – Trans Banyumas 4. Teman Bus Kota Palembang – Trans Musi	1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2. Operator Buy The Service 3. Uji Petik pada Teman Bus Kota Makassar – Trans Mamminasata	Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Tugas Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Nomor: ST 387 Tahun 2024	1. Pada awal pengoperasian BTS Trans Mamminasata tahun 2021 terdapat 4 koridor pelayanan, yang meliputi K1 (Pelabuhan Galesong - Panakkukang Square), K2 (Panakkukang Square - Bandara Internasional Sultan Hasanuddin), K3 (Kampus 2 PNUP - PIP Makassar), dan K4 (Unhas Teknik Gowa - Panakkukang Square); 2. Setelah dilakukan evaluasi kinerja pelayanan dan rerouting, saat ini beroperasi 3 koridor yang meliputi K1 (Pelabuhan Galesong - Panakkukang Mall), K2 (Unhas Tamalanrea - Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Stasiun Mandai), dan K3 (Unhas Teknik Gowa - Unhas Tamalanrea); 3. Load Factor periode Januari s.d. September 2024 yaitu K1 sebesar 56,64%; K2 sebesar 26,24%; dan K3 sebesar 75,90%; 4. Direktorat Angkutan Jalan melalui BPTD Kelas II Sulawesi Selatan telah melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengajukan penganggaran pada tahun 2025 dalam mengelola BTS Trans Mamminasata secara bertahap; 5. BPTD Kelas II Sulawesi Selatan berharap angkutan pete-pete perlu disinergikan dengan layanan BTS sebagai Feeder; 6. Selama beroperasinya BTS Trans Mamminasata berdampak positif terhadap budaya masyarakat khususnya kalangan pelajar dalam bertransportasi dengan angkutan umum; 7. Saat ini telah dilaksanakan beberapa kebijakan yang meliputi:

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
					a. Diskon tarif kepada Pelajar, Lansia, dan Disabilitas b. Integrasi tarif antar koridor BTS. Penumpang gratis melakukan perpindahan koridor dalam jangka waktu 90 menit 8. Program prioritas Pemerintah Daerah adalah mengintegrasikan pembayaran untuk antar moda menjadi satu kartu pembayaran; 9. Pendekatan terhadap Organda-Organda oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan secara bertahap untuk dapat menata trayek dan mengharmonisasikan layanan BTS dengan angkutan pete-pete; 10. Pemerintah Kota/Kabupaten diharapkan dapat memberikan subsidi terhadap angkutan pete-pete untuk dilakukan penataan trayek sebagai feeder
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi					
1	Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Buy The Service (BTS)	Palembang, Sumatera Selatan	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS), Direktorat Jenderal Perrekretapi	Berita Acara Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang dan BPTD Kelas 2 Provinsi Sumatera Selatan dan telah terbit SK Walikota Nomor: 416/KPTS/DISHUB/2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Pengumpan(Feeder) dari dan ke Stasiun Kereta Api Ringan (Light Rail Transit); 2. Telah ada halte dan bus stop yang berada dekat akses masuk atau keluar stasiun LRT Sumsel; 3. Telah ada jadwal perjalanan LRT Sumatera Selatan dan Jadwal Perjalanan Feeder LRT Sumatera Selatan; 4. Untuk feeder LRT Sumatera Selatan masih gratis atau belum berbayar sehingga belum diterapkan system pembayaran. Namun telah dilakukan Studi Kemauan dan Kemampuan Membayar Untuk Penelitian Tarif BTS di Palembang; 5. Sistem Kerjasama yang diterapkan pada penogperasian feeder LRT Sumsel adalah Skema Buy The Service (BTS).
2	Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Maksar-	Makassar - Parepare, Sulawesi Selatan	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BKPASS), Direktorat Jenderal	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan	1. Telah dilakukan tindak lanjut rencana aksi yang terdiri dari Koordinasi dan Harmonisasi Program, edukasi, promosi dan penyediaan akses. Namun masih perlu tindak lanjut pada penyediaan jaringan dan angkutan feeder dari stasiun ke kawasan sekitarnya

No.	Judul Analisis Kebijakan	Lokasi Kegiatan Pemantauan Kemanfaatan	Stakeholder	Data Dukung (Surat / IM /PM)	Kemanfaatan
	Parepare melalui Sinergitas dan Konektivitas		Perkeretaapian	Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	sehingga menambah coverage area pelayanan stasiun 2. Tim Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan mempresentasikan perjalanan kereta api, jumlah penumpang dan rencana integrasi intermoda di beberapa stasiun dengan kawasan sekitar, jalan akses stasiun dan Rencana Pembangunan Tahun 2024; 3. Tim Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan mempresentasikan pelayanan keterpaduan pelayanan kereta api dan program buy the service (BTS) dan rencana integrasi moda di stasiun Mandai dengan adanya pemindahan terminal daya ke Mandai; 4. Perlu melibatkan Pemerintah Daerah baik Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota setempat, terutama peran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat memfasilitasi integrasi dari semua stakeholder terkait; 5. Akan dilaksanakan sinkronisasi perencanaan prasarana integrasi moda (sebagai contoh: Stasiun Mandai) yang akan ditindaklanjuti oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Badan Kebijakan Transportasi; 6. Terkait permasalahan sarana angkutan moda lanjutan dapat ditindaklanjuti oleh Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Badan Kebijakan Transportasi; 7. Rencana tindak lanjut kegiatan ini adalah monitoring pelayanan Bus By The Service (BTS) dengan pelayanan KA dengan skema Single Tarif layanan BTS dan angkutan kereta api Makassar-Parepare.

LAMPIRAN 6. RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN I TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Boban Bunga	Subsidi	Hibah	Ban.Sos	LainLain	Transfer	
1	288752 SEKRETARIAT BADAN KEBUJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	46,758,254,000	48,386,646,000	2,675,929,000	0	0	0	0	0	0	97,820,829,000
		REALISASI	11,066,120,880 (23.38%)	8,231,915,429 (17.01%)	327,084,600 (12.22%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20,425,120,909 (20.83%)
		SISA	34,892,133,120	40,154,730,571	2,348,844,400	0	0	0	0	0	0	77,395,708,091
2	288944 PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	PAGU	0	21,225,863,000	1,049,090,000	0	0	0	0	0	0	22,274,863,000
		REALISASI	0.00%	3,835,321,834 (18.07%)	179,790,000 (17.13%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,015,021,834 (18.02%)
		SISA	0	17,390,541,166	869,300,000	0	0	0	0	0	0	18,259,841,166
3	288951 PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	PAGU	0	23,345,337,000	1,876,681,000	0	0	0	0	0	0	25,222,018,000
		REALISASI	0.00%	3,497,518,875 (14.98%)	243,895,000 (12.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,741,323,875 (14.83%)
		SISA	0	19,847,818,125	1,632,786,000	0	0	0	0	0	0	21,480,694,125
4	414267 PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	PAGU	0	29,227,198,000	299,870,000	0	0	0	0	0	0	29,527,068,000
		REALISASI	0.00%	1,491,757,879 (5.10%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,491,757,879 (5.05%)
		SISA	0	27,735,440,121	299,870,000	0	0	0	0	0	0	28,035,310,121
5	634171 PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	PAGU	0	21,352,562,000	260,000,000	0	0	0	0	0	0	21,612,562,000
		REALISASI	0.00%	2,279,811,348 (10.68%)	157,535,000 (60.59%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,437,346,348 (11.28%)
		SISA	0	19,072,750,654	102,465,000	0	0	0	0	0	0	19,175,215,654
GRAND TOTAL		PAGU	46,758,254,000	143,537,606,000	6,161,480,000	0	0	0	0	0	0	196,457,340,000
		REALISASI	11,066,120,880 (23.38%)	19,336,125,363 (13.47%)	908,124,600 (14.74%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	32,110,370,843 (16.34%)
		SISA	34,892,133,120	124,201,480,637	5,253,355,400	0	0	0	0	0	0	164,346,969,157

LAMPIRAN 7. RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN II TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Dulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Deban Bunga	Subsidi	Hibah	Dan Sos	LainLain	Transfer	
1	288752 SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	46.758.254,000	48.386.646,000	2.675.929,000	0	0	0	0	0	0	97.829.829,000
		REALISASI	23.256.168,381 (49.74%)	20.372.585,272 (42.10%)	688.733,610 (25.74%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.317.487,263 (45.30%)
		SISA	23.502.085,619	28.014.060,728	1.987.195,390	0	0	0	0	0	0	53.503.341,737
2	288944 PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	PAGU	0	21.225.863,000	1.049.000,000	0	0	0	0	0	0	22.274.863,000
		REALISASI	0.00%	8.809.819,622 (41.51%)	1.018.100,000 (97.05%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.827.919,622 (44.12%)
		SISA	0	12.416.043,378	30.900,000	0	0	0	0	0	0	12.446.943,378
3	288951 PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	PAGU	0	23.345.337,000	1.876.681,000	0	0	0	0	0	0	25.222.018,000
		REALISASI	0.00%	11.202.652,975 (47.99%)	1.522.286,150 (81.12%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.724.939,125 (50.45%)
		SISA	0	12.142.684,025	354.394,850	0	0	0	0	0	0	12.497.078,875
4	414267 PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	PAGU	0	29.227.198,000	299.870,000	0	0	0	0	0	0	29.527.068,000
		REALISASI	0.00%	6.568.929,961 (22.48%)	289.000,000 (96.38%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.857.929,961 (23.23%)
		SISA	0	22.658.268,039	10.870,000	0	0	0	0	0	0	22.669.138,039
5	634171 PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	PAGU	0	21.352.562,000	260.000,000	0	0	0	0	0	0	21.612.562,000
		REALISASI	0.00%	7.503.278,806 (35.14%)	259.996,500 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.763.275,306 (35.92%)
		SISA	0	13.849.283,194	3.500	0	0	0	0	0	0	13.849.286,694
GRAND TOTAL		PAGU	46.758.254,000	143.537.606,000	6.161.480,000	0	0	0	0	0	0	196.457.340,000
		REALISASI	23.256.168,381 (49.74%)	54.457.266,046 (37.94%)	3.778.116,260 (61.32%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	81.491.550,687 (41.48%)
		SISA	23.502.085,619	89.080.339,954	2.383.363,740	0	0	0	0	0	0	114.965.789,313

LAMPIRAN 8. RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN III TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 09

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	288752 SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	46,758,254,000	54,232,231,000	2,675,929,000	0	0	0	0	0	0	103,666,414,000
		REALISASI	32,027,802,495 (68.50%)	36,933,424,289 (68.10%)	1,173,833,451 (43.87%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70,135,060,235 (67.65%)
		SISA	14,730,451,505	17,298,806,711	1,502,095,549	0	0	0	0	0	0	33,531,353,765
2	288944 PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	PAGU	0	19,980,863,000	1,049,000,000	0	0	0	0	0	0	21,029,863,000
		REALISASI	0.00%	14,435,099,722 (72.24%)	1,018,100,000 (97.05%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15,453,199,722 (73.48%)
		SISA	0	5,545,763,278	30,900,000	0	0	0	0	0	0	5,576,663,278
3	288951 PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	PAGU	0	21,156,694,000	1,876,681,000	0	0	0	0	0	0	23,033,375,000
		REALISASI	0.00%	16,046,586,067 (75.85%)	1,870,454,550 (99.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,917,042,617 (77.79%)
		SISA	0	5,110,107,933	6,226,450	0	0	0	0	0	0	5,116,332,383
4	414267 PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	PAGU	0	27,402,118,000	299,870,000	0	0	0	0	0	0	27,701,988,000
		REALISASI	0.00%	18,375,306,077 (67.06%)	298,750,000 (99.63%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18,674,056,077 (67.41%)
		SISA	0	9,026,811,923	1,120,000	0	0	0	0	0	0	9,027,931,923
5	634171 PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	PAGU	0	20,765,700,000	260,000,000	0	0	0	0	0	0	21,025,700,000
		REALISASI	0.00%	14,858,164,517 (71.55%)	259,996,500 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15,118,161,017 (71.90%)
		SISA	0	5,907,535,483	3,500	0	0	0	0	0	0	5,907,536,983
GRAND TOTAL		PAGU	46,758,254,000	143,537,606,000	6,161,480,000	0	0	0	0	0	0	196,457,340,000
		REALISASI	32,027,802,495 (68.50%)	100,648,582,672 (70.12%)	4,621,134,501 (75.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	137,297,519,668 (69.89%)
		SISA	14,730,451,505	42,889,023,328	1,540,345,499	0	0	0	0	0	0	59,159,820,332

LAMPIRAN 9. RELISASI ANGGARAN SATKER PER JENIS BELANJA TRIWULAN IV TA 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Reban Ilunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	208752 SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	41.936.254.000	58.404.231.000	3.325.929.000	0	0	0	0	0	0	103.666.414.000
		REALISASI	41.488.904.048 (98.93%)	55.905.815.212 (95.82%)	3.325.893.961 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.780.613.221 (97.22%)
		SISA	447.349.952	2.438.415.788	35.039	0	0	0	0	0	0	2.885.800.779
2	208944 PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI	PAGU	0	19.980.863.000	1.040.000.000	0	0	0	0	0	0	21.020.863.000
		REALISASI	0.00%	18.956.151.094 (94.87%)	1.046.450.000 (99.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.002.601.094 (95.12%)
		SISA	0	1.024.711.906	2.550.000	0	0	0	0	0	0	1.027.261.906
3	208951 PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	PAGU	0	21.156.694.000	1.876.601.000	0	0	0	0	0	0	23.033.375.000
		REALISASI	0.00%	19.545.657.868 (92.39%)	1.876.654.550 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	21.422.312.418 (93.01%)
		SISA	0	1.611.036.132	26.450	0	0	0	0	0	0	1.611.062.582
4	414267 PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	PAGU	0	27.402.118.000	299.870.000	0	0	0	0	0	0	27.701.988.000
		REALISASI	0.00%	25.693.467.844 (93.76%)	290.750.000 (99.63%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.992.217.844 (93.83%)
		SISA	0	1.708.650.156	1.120.000	0	0	0	0	0	0	1.709.770.156
5	634171 PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	PAGU	0	20.765.700.000	260.000.000	0	0	0	0	0	0	21.025.700.000
		REALISASI	0.00%	19.585.538.903 (94.32%)	259.996.500 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.845.535.403 (94.39%)
		SISA	0	1.180.161.097	3.500	0	0	0	0	0	0	1.180.164.597
GRAND TOTAL		PAGU	41.936.254.000	147.709.606.000	6.811.480.000	0	0	0	0	0	0	196.457.340.000
		REALISASI	41.488.904.048 (98.93%)	139.746.830.921 (94.61%)	6.807.745.011 (99.95%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	188.043.279.980 (95.72%)
		SISA	447.349.952	7.962.775.079	3.734.989	0	0	0	0	0	0	8.414.060.020

LAMPIRAN 10. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

Hasil Kementerian Perhubungan		
RB General	75.94	
RB Terpadu	1.31	
Total Nilai	77.25	
Total Skor RB General	100	
Skor RB General Penyusutan	100	
RB General Penyusutan	75.94	
Index RB	77.25	
File Berkas		

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

LAMPIRAN 11. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024 BERDASARKAN LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

A. Gambaran Umum Capaian Kegiatan Utama

Capaian Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	81,16%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100%
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	4
		Indeks SPBE	4
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80
		Indeks Perencanaan Pembangunan	85
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,25
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	2
7	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,5
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	79
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	90,63 (Predikat Sangat Baik)
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	77

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2024
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan	71 (Predikat Sangat Baik)
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan	80
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Monitoring Pelaksanaan Anggaran	94,12
		Opini BPK	5
		Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK	83
		Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan	3,25
Capaian Utama RB General Sasaran Strategis 2 Tahun 2024			
16	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	306
17	Pelaksanaan Core Values Aparatur Sipil Negara	Indeks BerAKHLAK	65%
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik Prima	4,7
		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan	82,21

Tim Evaluator Meso belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi birokrasi sehingga sebagian besar target indikator kegiatan utama belum dapat dilakukan pengukuran ketercapaian target. Namun beberapa indikator kegiatan utama dapat dilakukan pengukuran ketercapaian target pada triwulan II 2024, yaitu:

1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi yang tidak terdapat penambahan penyederhanaan pada tahun 2024.
2. Indeks Kualitas Kebijakan yang dilakukan penilaian dua tahun sekali (2023-2024).
3. Indeks Kepuasan Masyarakat yang menggunakan penilaian mandiri per Triwulan II Tahun 2024.

Seluruh target ketiga indikator kegiatan utama tersebut telah tercapai pada Triwulan (TW) II Tahun 2024.

3. Gambaran Umum Capaian Rencana Aksi

1. Penyederhanaan Birokrasi

Pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Struktur Organisasi Pasca Penyederhanaan yang ditargetkan pada triwulan IV. Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, Kementerian Perhubungan telah melakukan penyesuaian peta jabatan berdasarkan struktur

organisasi pasca penyederhanaan untuk unit kerja Eselon I, serta sedang melaksanakan evaluasi kelembagaan dalam rangka penataan organisasi.

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kementerian Perhubungan telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan *squad team*, serta melakukan penyesuaian proses bisnis. Pada tahun 2024, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Sub Proses (Level 1), dan Peta Relasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, akan ditetapkan Peta Sub Proses Level 2 dan Peta Lintas Fungsi (*cross functional map*) pada kelompok proses inti, pendukung, dan sumber daya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rencana aksi pada indikator ini ditargetkan tercapai pada TW IV, saat ini sedang dilakukan monitoring atas penerapan Ketua Tim di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

Pada tahun 2024, akan disusun Arsitektur SPBE (*to-be* dan *gap-analysis*) dan Peta Rencana SPBE dengan target penyelesaian pada TW IV. Dalam rangka penyusunan arsitektur SPBE telah dikoordinasikan pengumpulan data dukung dari setiap unit eselon I di lingkup Kemenhub yang mencakup domain layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE. Kementerian Perhubungan telah menyampaikan Surat Permohonan Validasi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) Tingkat 3 Kemenhub kepada Kementerian PANRB. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola TIK, Kemenhub telah melaksanakan reviu dan *clearance* belanja TIK dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE.

4. Indeks SPBE

Rencana aksi atas indikator kinerja utama indeks SPBE pada tahun 2024 ditargetkan pada TW III dan IV. Namun telah dilaksanakan beberapa upaya untuk mencapai target dimaksud, diantaranya adalah:

- a. melaksanakan evaluasi atas domain kebijakan yang telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draft revisi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. melaksanakan reviu atas aspek penyelenggaraan SPBE, yaitu reviu atas KM 75 Tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan dengan mempertajam tugas tim koordinasi;
- c. melaksanakan evaluasi atas domain manajemen SPBE yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE dan Pedoman Audit TIK;
- d. melaksanakan evaluasi atas domain layanan dan rapat pembahasan terkait peningkatan layanan melalui Sistem manajemen layanan teknologi informasi

dan komunikasi (SIMALIK) yang telah disiapkan sebagai layanan pemberian bantuan / *helpdesk* terkait informasi dan kendala yang dialami oleh pengguna.

5. Nilai SAKIP

Target rencana aksi atas indikator kinerja utama nilai SAKIP telah tercapai sesuai dengan target per triwulan, yaitu pelaksanaan penyusunan dokumen Evaluasi Akhir Periode Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 dan Laporan Pendahuluan Evaluasi RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025, penetapan target kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja Kementerian dan Unit Eselon I, serta pelaporan capaian kinerja Kementerian Perhubungan setiap bulan melalui aplikasi *e-performance* dan pelaksanaan monitoring per triwulan. Untuk rencana aksi yang ditargetkan pada triwulan IV, telah dilakukan upaya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencantumkan capaian kinerja Kementerian Perhubungan/Unit Kerja dibandingkan dengan rata-rata capaian tingkat internasional dan informasi analisis efisiensi dan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir dokumen Renstra dengan progress capaian sampai dengan triwulan I.

6. Indeks Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen Naskah Teknokratik RPJP Kemenhub 2025-2045 yang selaras dengan RPJP Nasional 2025-2045 dan konsep Naskah Teknokratik Renstra Kemenhub 2025-2029 yang selaras dengan RPJMN 2025-2029 akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Kementerian Perhubungan telah menyusun laporan pendahuluan kajian penyusunan RPJP dan penyusunan naskah teknokratik renstra Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara berkala pada setiap triwulan. Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan (PPTB) sebagai koordinator pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah melakukan pendampingan pelaksanaan survei dan bimbingan teknis Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat 3AS Case Survey *Management* Kementerian Perhubungan.

8. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja dan memastikan enam area perubahan berjalan secara efektif, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas pada 11 unit kerja yang akan diusulkan, dan akan kembali dilakukan pendampingan pada unit kerja lain di Triwulan III. Pada tahun 2024, terdapat 18 unit kerja yang telah dilakukan evaluasi internal pembangunan Zona Integritas. Pada triwulan IV akan dilaksanakan Pemantauan terhadap Unit Kerja yang telah Mendapat Predikat WBK/WBBM.

9. Tingkat Maturitas SPIP

Untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP, telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut *Area of Improvement (Aoi)*

SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan. Terdapat 11 Aol SPIP Kementerian Perhubungan dengan status tindak lanjut tuntas 9 Aol dan tindak lanjut proses 2 Aol. Penjaminan Kualitas SPIP tahun 2024 telah dilaksanakan pada triwulan II, dengan jumlah satker yang dilakukan Penjaminan Kualitas sebanyak 178 satker dari total 335 satker yang melakukan Penilaian Mandiri SPIP Kementerian Perhubungan.

Sebagai instrumen evaluasi atas penerapan manajemen risiko, telah disusun Draft Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko. Penetapan pedoman ditargetkan pada bulan Juni 2024. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko, Inspektorat Jenderal melaksanakan pendampingan penerapan manajemen risiko kepada unit kerja. Sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko di Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Implementasi pedoman tersebut, antara lain:

- a. Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan; dan
- b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) dalam rangka digitalisasi proses manajemen risiko untuk tingkat entitas Eselon I, Eselon II Pusat dan UPT Mandiri.

0. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dilakukan pada TW II dan IV. Evaluasi Pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi LAPOR akan dilaksanakan di TW III, evaluasi akan dilaksanakan terhadap efektivitas penanganan pengaduan melalui aplikasi LAPOR, termasuk terkait percepatan verifikasi dan tindak lanjut pengaduan yang masuk, serta substansi tindak lanjut yang memadai.

Perlunya integrasi pengelolaan pengaduan masyarakat di Kementerian Perhubungan sehingga akan dilakukan perubahan pedoman pengelolaan Pengaduan melalui Aplikasi LAPOR dengan target penyelesaian pada TW IV.

Guna meningkatkan pemahaman tim pengelola pengaduan masyarakat, akan dilaksanakan sosialisasi kepada tim internal terkait pengelolaan pengaduan masyarakat pada TW IV.

1. Survei Penilaian Integritas

Peningkatan pemahaman tentang anti korupsi dan partisipasi pengisian survei Penilaian Integritas dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi anti korupsi dan partisipasi pengisian survei Penilaian Integritas dengan jumlah 245 peserta yang hadir. Pada TW III akan dilaksanakan kembali sosialisasi dengan target 50 peserta.

Sebagai tindak lanjut dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Inspektorat Jenderal telah mengoordinasikan penyusunan rencana aksi SPI bersama seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah disampaikan surat Inspektur Jenderal kepada Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor

KP.904/3/ITJEN/2024 tanggal 27 Mei 2024. Beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan, antara lain:

- a. Menyusun Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penerapan Kode Etik Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Melakukan evaluasi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. Melakukan evaluasi atas Instruksi Menteri Nomor IM 17 tahun 2018 tentang Penguatan Aksi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Melakukan evaluasi atas Instruksi Menteri Nomor IM 5 Tahun 2019 tentang Penguatan Budaya Anti Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. Mengoptimalkan peran Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Utama, UPG pada masing-masing eselon I, UPG Unit Kerja, dan melakukan pemantauan secara berkala;
- f. Melakukan monitoring secara berkala setiap bulan terkait penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.

Pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi survei penilaian integritas tahun 2023 akan dilaksanakan pada triwulan IV.

2. Indeks Kualitas Kebijakan

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilaksanakan setiap 2 tahun. Capaian pada tahun 2023 sebesar 90,63 dengan Predikat Sangat Baik, dan akan dilakukan penilaian kembali pada tahun 2025. Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan penentuan sampling kebijakan sesuai dengan kriteria penentuan populasi kebijakan dan persiapan pengumpulan data dukung. Pembahasan awal akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2024.

3. Indeks Reformasi Hukum

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan hukum dan regulasi di lingkup Kemenhub, telah dilakukan:

- a. Pengusulan formasi pegawai/SDM pada Biro Hukum Kementerian Perhubungan melalui aplikasi SIASN.
- b. Analisa dan evaluasi terhadap peraturan yang telah ditetapkan yaitu PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

4. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI, diselenggarakan pelatihan penggunaan aplikasi SRIKANDI pada unit kerja di Kementerian Perhubungan dan telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor

SE-PHB 04 Tahun 2024 tentang Penerapan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Saat ini sedang dilaksanakan migrasi data dari aplikasi JIKN versi 1 ke versi 2. Kementerian Perhubungan mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Simpul Jaringan Pilot Project (SJPP) JIKN tanggal 26 April 2024 pada Acara Rakor Temu Jaringan Nasional Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Pada triwulan III akan ditetapkan SOP Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sampai dengan TW II 2024, telah dilaksanakan Alih Media Arsip Permanen Kementerian Perhubungan sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) file item arsip permanen.

15. Indeks Pembangunan Statistik

Kementerian Perhubungan telah menyusun draft kebijakan Satu Data Transportasi dengan target penetapan pada TW IV. Saat ini, Kementerian Perhubungan sedang dalam proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh BPS.

16. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perhubungan

Salah satu langkah percepatan pengadaan barang/jasa adalah dengan segera menetapkan dan mengumumkan RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penginputan SIRUP Tahun Anggaran 2024 dan penyelesaian paket *E-Purchasing* Tahun Anggaran 2023 pada TW I.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah dilakukan:

- a. Pemberitahuan pada seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor KP.001/1/13/STJ/2024 tanggal 20 Februari 2024.
- b. Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Keuangan Negara dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada TW I.

17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara relevan dan terjadwal, dilaksanakan monitoring revisi DIPA dan penyusunan RPD setiap triwulan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, dan memperhatikan asas kepatuhan serta tersusunnya administrasi pelaksanaan anggaran, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan.

18. Opini BPK

Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2023 *Unaudited* dan *Audited*, secara tepat waktu. Biro Keuangan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan dengan menyampaikan ketentuan dan kebijakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh Unit Eselon I.

Dalam rangka meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, telah dilaksanakan Penilaian PIPK Tingkat UAPA Kemenhub Tahun 2023 dan laporan hasil penilaian tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Untuk Penilaian PIPK Tahun 2024, pada TW II telah ditetapkan Satker Sampling dan Akun Signifikan serta penetapan *Risk Control Matrix*.

Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 *unaudited* pada TW I. Reviu atas Laporan Keuangan Semester I akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

19. Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, pada TW I tahun 2024 Inspektorat Jenderal telah menyampaikan Temuan dan Rekomendasi LHP BPK RI kepada unit kerja terkait.

Sampai dengan TW II, telah dilaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap unit kerja pada wilayah Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Semarang.

Dalam rangka intensifikasi tindak lanjut, telah dilaksanakan *sharing session* dan rapat koordinasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024, bersama dengan entitas eselon I.

20. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Perhubungan

Dalam rangka peningkatan pengamanan aset, telah disusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Semester II dan Tahunan Tahun 2023 dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor PL202/1/1/Phb/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Perhubungan Semester II dan Tahunan Tahun 2023.

Untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, akan dilaksanakan Monitoring Administrasi BMN yang Andal Berupa Peningkatan Sertifikasi Barang Milik Negara secara triwulan. Total keseluruhan capaian sertifikasi BMN sampai dengan 4 Juni 2024 mencapai 19,73%.

21. Indeks Merit

Dalam rangka meningkatkan indeks merit, beberapa rencana aksi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional (JF) bidang transportasi sebanyak 153 SKJ;
- b. Penetapan pedoman penyusunan formasi JF PKB dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2024, dan masih disusun penyusunan pedoman formasi bagi JF Teknisi Penerbangan yang ditargetkan akan ditetapkan pada TW IV;
- c. Penyusunan soal uji kompetensi JF bidang transportasi;
- d. Pelaksanaan uji kompetensi JF bidang transportasi bagi JF Pengawasan Keselamatan Pelayaran, JF Bidang Perkeretaapian, JF Teknisi Penerbangan, serta inpassing JF Bidang Perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terkait JF bidang transportasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JF PKB;
 - 2) Sosialisasi Kebijakan JF bidang Transportasi Udara;
 - 3) Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Tahunan JF Bidang Transportasi;
 - 4) Sosialisasi Jabatan Fungsional Transportasi PNS penugasan di luar instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2022 dan Sosialisasi Konversi Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit Jabatan Fungsional serta implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023;
 - 5) Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Wilayah Sumatera Barat;
 - 6) Bimtek Konversi Predikat Kinerja Menjadi Angka Kredit Jabatan Fungsional Untuk PNS di Lingkungan Kemenhub Maupun PNS Penugasan di luar Instansi Pemerintah.
- f. Penetapan dan pelaksanaan sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Pendidikan melalui Mekanisme Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sosialisasi dilaksanakan secara luring dan daring pada 17 Mei 2024 dan diikuti oleh pengelola kepegawaian seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- g. Pelaksanaan sosialisasi terkait kebijakan JF di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diikuti oleh perwakilan seluruh unit Eselon I sebanyak dua kali dengan tema Penetapan Angka Kredit dan Penilaian Kinerja JF di lingkungan Kemenhub dan Mekanisme Transformasi dan Pengangkatan JF. Untuk dua tema yang ditargetkan pada TW III dan IV akan dilaksanakan sosialisasi terkait perhitungan formasi JF dan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi bagi JF di lingkungan Kemenhub.
- h. Pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-kinerja telah diterapkan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan mulai dari penyusunan Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP). Namun demikian, Laporan dan Penilaian Kinerja Bulanan seluruh pegawai sampai dengan TW II 2024 baru mencapai 70% dan ditargetkan pada TW III seluruh pegawai telah menerapkan pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara penuh. Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kinerja melalui aplikasi e-kinerja telah dilakukan dan ditindaklanjuti dengan adanya penambahan modul ketua tim dalam aplikasi e-kinerja.

- i. Pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai Instansi Kantor Pusat dan UPT Wilayah Jabodetabek Kemenhub untuk jabatan fungsional dan pelaksana yang diikuti sejumlah 3097 pegawai dengan menggunakan *metode Computer Assisted Competency Test* (CACT BKN).
- j. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran disiplin ASN telah dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan terkait penjatuhan disiplin ASN tingkat berat di lingkungan Kementerian Perhubungan atas 10 pegawai. Pelanggaran yang dilakukan adalah terkait sebagai berikut :
 - 1) mangkir (tidak masuk kerja);
 - 2) tindak pidana korupsi;
 - 3) pelanggaran PP 10/1983 dan PP 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS;
 - 4) tindak pidana narkoba;
 - 5) Penyalahgunaan Wewenang.
- k. Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi *assessment* proyeksi jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilaksanakan kepada 317 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 17 pegawai untuk proyeksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
 - 2) 50 pegawai untuk proyeksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
 - 3) 71 pegawai untuk proyeksi Jabatan Administrator
 - 4) 179 pegawai untuk proyeksi Jabatan Pengawas.
- l. Pelaksanaan sosialisasi terkait penerapan kebijakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilaksanakan pada TW III untuk seluruh unit Eselon I Kemenhub. Namun sampai dengan TW II telah diselenggarakan sebanyak 2 kali, dengan peserta terbatas dan tema sebagai berikut :
 - 1) Penerapan Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menjalani Hukuman Disiplin Berat Dalam Jabatan Fungsional, diikuti oleh perwakilan Unit Eselon I;
 - 2) Penyusunan tanggapan dan banding administratif hukuman disiplin pegawai dan Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diikuti oleh perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Maratua dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- m. Dalam rangka pemberian penghargaan pegawai terhadap 2200 pegawai yang ditargetkan pada Triwulan III, telah dilakukan sosialisasi, rekonsiliasi data dan verifikasi berkas pengusulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya tahun 2024.

- n. Dalam rangka penetapan rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan yang ditargetkan pada TW IV, sedang dilakukan identifikasi dan pemetaan data rencana pegawai yang sedang dan akan melakukan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan pada tahun 2024.

22. Indeks BerAKHLAK

Perwakilan Kementerian Perhubungan menghadiri Forum Budaya Kerja BerAKHLAK yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan Sosialisasi Core Values BerAKHLAK ditargetkan pada triwulan III dan IV, dengan target pelaksanaan survei pada triwulan III.

23. Indeks Pelayanan Publik Prima

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Induk Penyandang Disabilitas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah menyelenggarakan kegiatan *Workshop* Pelayanan yang Ramah, Responsif dan Sensitif terhadap Kelompok Rentan pada Sektor Transportasi pada TW II.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan Sarana dan Prasarana kelompok rentan dilaksanakan pada Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada triwulan I, II, dan III. Hasil dari kegiatan Monev menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan sebagai bahan masukan perbaikan bagi UPP.

24. Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan

Dalam rangka peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik, telah dilaksanakan:

- Rapat Koordinasi Kepatuhan Penerapan Standar Pelayanan dan Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.
- Koordinasi dengan Ombudsman RI dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik serta persiapan penilaian tahun 2024 pada TW I.
- Rapat inventarisasi produk layanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang akan dijadikan dasar penilaian Tim Penilai Ombudsman RI Tahun 2024.
- Evaluasi Standar Pelayanan Publik dilaksanakan setiap triwulan. PPTB turut melakukan Asistensi Evaluasi Kinerja Pelayanan publik dan Bimbingan Teknis Pendokumentasian Pelayanan Publik melalui pemenuhan Standar Pelayanan pada Unit Kerja di Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN 12. HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL		
	JL.MERDEKA BARAT 8 JAKARTA 10110	TEL. (021) 3450919 3813154 3507656	FAX : (021) 3813154 TLX : 44310 DEPHUB 1A FAX :
Nomor : PS.307/1/1/ITJEN/2023			Jakarta, 30 Agustus 2023
Klasifikasi : Biasa			
Lampiran : -			
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2022 pada Badan Kebijakan Transportasi			
Yth. Kepala Badan Kebijakan Transportasi			
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:			
1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 pada Badan Kebijakan Transportasi dengan tujuan: a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; c. Menilai akuntabilitas kinerja; d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 2. Penilaian tidak hanya dilakukan atas implementasi SAKIP Eselon I saja, akan tetapi penilaian dilakukan terhadap implementasi SAKIP Eselon II di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, serta Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dimana hasil penilaian terhadap Eselon II akan berpengaruh terhadap penilaian Eselon I; 3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 4. Dari ...			

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut yang didasarkan pada penilaian terhadap unsur pemenuhan dokumen, kualitas, dan pemanfaatan SAKIP, Badan Kebijakan Transportasi memperoleh nilai sebesar **80,80 (Predikat A)** dengan interpretasi **"Memuaskan"** dengan gambaran bahwa Badan Kebijakan Transportasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,67
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,67
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,25
Nilai Hasil Evaluasi			80,80
Predikat			A

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja pada masing-masing Unit Kerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja sebesar **23,67 dari nilai maksimal 30**. Pada komponen perencanaan kinerja rata-rata sudah terpenuhi dengan baik, namun terdapat beberapa kriteria komponen yang dinilai belum terpenuhi yaitu:

- 1) Ketidaktepatan waktu dalam meng-*upload* dokumen perencanaan pada *website* esr.menpan.go.id sesuai batas waktu yang ditentukan (28 Februari);
- 2) Rata-rata capaian kinerja belum memenuhi kriteria setidaknya masih *on the right track* (antara 90% s.d. 110%) yaitu pada Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebesar 133,17%, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebesar 117,5%, serta Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi sebesar 133,03%.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja sebesar **25,20 dari nilai maksimal 30**. Pada komponen pengukuran kinerja sudah terpenuhi dengan baik, namun dinilai belum terdapat beberapa upaya lebih yang bisa

dihargai...

dihargai dari pemenuhan kriteria sub komponen tersebut, dan harapannya untuk dapat ditingkatkan agar mendapat nilai yang lebih baik.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja sebesar **11,67 dari nilai maksimal 15**. Pada komponen perencanaan kinerja rata-rata sudah terpenuhi dengan baik, namun terdapat beberapa kriteria komponen yang dinilai belum terpenuhi yaitu:

- 1) Pada dokumen LKIP tidak terdapat perbandingan realisasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berjalan (minimal 2 tahun sebelum tahun berjalan);
- 2) Belum terinformasikan pada dokumen LKIP Eselon II terkait hasil *benchmarking* dengan instansi K/L lain terkait indikator kinerja yang sejalan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar **20,25 dari nilai maksimal 25**. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dan telah dilakukan persamaan persepsi terkait hasil evaluasi mandiri, namun belum disampaikan laporan hasil evaluasi mandiri yang telah dilaksanakan pada setiap unit yang ditandatangani oleh masing-masing evaluator.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Publikasi dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja agar dapat menyesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi pada Laporan Kinerja selanjutnya tentang hasil *benchmarking* dengan instansi lain (Nasional/Internasional) mengenai Indikator Kinerja yang sejalan;
3. Setiap unit kerja agar melakukan realisasi capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan (*on the right track*);
4. Melaporkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mandiri tiap unit kerja yang sudah ditandatangani oleh setiap evaluator mandiri.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 Badan Kebijakan Transportasi. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Mohon ...

Mohon kiranya Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Inspektur Jenderal,

Arif Toha

NIP 196703201992031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
3. Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
4. Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
5. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan;
6. Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

LAMPIRAN 13. HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL	JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110	TELP : (021) 3456919 3813154 3507656	FAX : (021) 3813154 TLX : 44310 DEPHUB IA
Nomor : PS.302/7/2/ITJEN/2024		Jakarta, 01 Agustus 2024		
Klasifikasi : Terbatas				
Lampiran : -				
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 pada Badan Kebijakan Transportasi				
Yth. Kepala Badan Kebijakan Transportasi				
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1-ITJEN-Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 49 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:				
1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Badan Kebijakan Transportasi dengan tujuan: a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; c. Menilai akuntabilitas kinerja; d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 2. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja Eselon I saja, namun juga dilakukan uji petik terhadap akuntabilitas kinerja pada beberapa Unit Kerja yaitu: a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi; b. Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi; c. Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan; d. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi; e. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda. 3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Badan Kebijakan Transportasi memperoleh nilai **79,14 (Predikat BB)** dengan interpretasi "**Sangat Baik**" yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,98
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	79,14
Predikat			BB

6. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 22,98 dari nilai maksimal 30,00 dengan catatan:

- 1) Indikator kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART-C, dimana terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya masuk kedalam kriteria *Achievable*, yaitu dapat dicapai, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendalinya (*controllable*);
- 2) Anggaran kegiatan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai atau belum berbasis kinerja;
- 3) Belum sepenuhnya terdapat bukti yang memadai adanya rapat pembahasan yang melibatkan seluruh pimpinan baik Eselon I dan II (*decision maker*) yang membahas evaluasi dan capaian kinerja secara berkala (triwulanan) dan

tahunan sebagai bahan masukan terdapat kebijakan, strategi dan perencanaan kinerja berikutnya;

- 4) Belum terdapat bukti yang memadai bahwa terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan dari hasil analisis evaluasi dan saran perbaikan kinerja sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 24,60 dari nilai maksimal 30,00 terdapat beberapa catatan pada Sub Komponen yang belum terpenuhi, yaitu:

- 1) Pengukuran capaian kinerja belum didasarkan kepada pengumpulan data kinerja yang relevan dari masing-masing sumber data yang ada, sesuai dengan Manual IKU dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai serta perlu adanya validasi atas sumber data dimaksud;
- 2) Pengukuran Kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, didalam pengukuran kinerja dimaksud belum sepenuhnya ada keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) secara berjenjang baik Eselon I dan II dalam melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta dijadikan penyesuaian strategi, kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 11,55 dari nilai maksimal 15,00 dengan catatan:

- 1) Informasi dalam Laporan Kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi belum sepenuhnya digunakan sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian anggaran serta mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi Informasi, hal ini didasarkan karena penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dan dijadikan dasar bagi perencanaan berikutnya;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja di tingkat Eselon I dan II belum menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja dengan rata-rata capaian di tingkat nasional/internasional serta adanya *benchmarking* yang memadai;
- 3) Masih terdapat dokumen Laporan Kinerja sebagian unit kerja yang belum menyajikan informasi terkait analisis efisiensi serta perbandingan antara

realisasi kinerja dengan target akhir kinerja yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 20,00 dari nilai maksimal 25,00 dengan catatan:

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja, hal ini ditunjukkan masih terdapat rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya yang belum dapat ditindaklanjuti dan masih terdapat catatan yang sama;
 - 2) Evaluasi AKIP Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja dengan SDM yang memadai.
7. Rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya (tahun 2023) yang belum ditindaklanjuti (dalam proses) adalah sebagai berikut:
- a. Publikasi dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja agar dapat menyesuaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan ;
 - b. Setiap unit kerja agar melakukan realisasi capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan (*on the right track*) terhadap catatan dimana masih terdapat realisasi capaian kinerja yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (>120%);
 - c. Melaporkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mandiri tiap unit kerja yang sudah ditandatangani oleh setiap evaluator mandiri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu dan mengevaluasi kembali Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi khususnya untuk digunakan pada Renstra 2025-2029 agar dapat memenuhi kriteria SMART-C (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance, Time bound* dan Cukup);
2. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap setiap pengusulan anggaran kegiatan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang didasarkan kepada sasaran dan kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan yang ada;
3. Mendorong komitmen pimpinan (*decision maker*) unit kerja Eselon I dan II untuk terlibat aktif dalam memonitoring, mengevaluasi dan memberikan *feedback* terkait capaian kinerja triwulanan dan tahunan, pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan, dan pemantauan serta evaluasi efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai

kinerja sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan baik Renstra, Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi;

4. Menjadikan informasi dalam dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Monitoring Capaian Kinerja sebagai sumber informasi untuk perbaikan kebijakan, strategi, penyesuaian anggaran, dan perencanaan kinerja berikutnya baik terhadap dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja maupun Rencana Aksi dalam rangka mendorong adanya perubahan budaya kinerja organisasi;
5. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja unit kerja Eselon I dan II dengan menyajikan perbandingan antara capaian kinerja dengan rata-rata capaian di tingkat nasional dan internasional dan menyajikan informasi terkait analisis efisiensi serta perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir yang terdapat pada dokumen Renstra serta dapat menyampaikan Laporan Kinerja (triwulanan dan tahunan) secara tepat waktu serta memanfaatkan hasil dari evaluasi dan pemantauan kinerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan strategi untuk mencapai target kinerja berikutnya;
6. Melakukan Evaluasi AKIP Internal secara mendalam dan memadai yang dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi oleh SDM yang kompeten, dimana hasil evaluasi dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja, sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dan informasi kepada pengambil keputusan (*decision maker*) dalam menentukan strategi perencanaan dan kebijakan berikutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 Badan Kebijakan Transportasi. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Inspektur Jenderal

Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

LAMPIRAN 14. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 92, JAKARTA 12196
TELEPON (021) 7366361 - 7366362, FAKSIMILE (021) 7366323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/59/AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Kementerian Perhubungan**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti **sebagian** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Sedang dilakukan proses reviu dokumen kinerja pada seluruh unit kerja untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja unit kerja telah menjawab isu strategis dan berorientasi *outcome* pada level kinerjanya;
- b. Telah melakukan perbaikan dokumen *cascading* kinerja untuk memastikan bahwa *cascading* kinerja telah memenuhi prinsip *logis/logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan;
- c. Telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) individu yang mendukung kinerja organisasi;
- d. Mendorong komitmen pimpinan unit kerja untuk terlibat aktif dalam memberikan *feedback* terkait perbaikan pencapaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, dan pemantauan serta evaluasi efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai kinerja;
- e. Meningkatkan kualitas laporan kinerja kementerian dan sebagian unit kerja dengan menyajikan informasi secara detail terkait analisis efisiensi dan upaya yang akan dilakukan ke depan dalam rangka memperbaiki kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa nilai sebesar 78,89 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada tingkat Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,79	25,13
b. Pengukuran Kinerja	30	22,50	22,86
c. Pelaporan Kinerja	15	11,81	12,07
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,48	18,83
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,58	78,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat sasaran strategis pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang seharusnya masuk ke dalam *stakeholder perspective* namun masuk ke dalam *internal process perspective*. Hal ini menyebabkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang seharusnya diturunkan ke unit kerja teknis namun diturunkan ke unit kerja dukungan;
- Target indikator kinerja *On Time Performance* (OTP) transportasi udara pada dokumen perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2023 lebih rendah bila dibandingkan dengan target indikator pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023;
- Masih terdapat target indikator kinerja di tahun 2023 yang lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja yang sama di tahun 2022 baik di tingkat Kementerian maupun di tingkat unit kerja;
- Dokumen rencana aksi sebagian unit kerja kerja belum menyajikan informasi terkait target *output* bulanan/triwulanan yang akan dicapai.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat dokumen indikator kinerja utama (IKU) sebagian unit kerja yang tidak dilengkapi dengan deskripsi operasional dan formulasi perhitungan;
- Aplikasi *e-performance* belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian unit kerja, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat banyak unit kerja yang belum tertib dalam menyampaikan laporan capaian kinerja/kegiatan triwulanan;

3

- Masih terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai di tahun 2022 baik di tingkat Kementerian maupun di tingkat unit kerja.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen Laporan Kinerja di tingkat Kementerian dan unit kerja belum menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja Kementerian/unit kerja dengan rata-rata capaian di tingkat internasional;
- Masih terdapat dokumen laporan kinerja sebagian unit kerja yang belum menyajikan informasi terkait analisis efisiensi serta perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja baik pada level kementerian maupun unit kerja, hal ini ditunjukkan masih terdapat sebagian kinerja di tingkat Kementerian dan unit kerja yang belum tercapai;
- Catatan dan rekomendasi komponen evaluasi pada laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar hanya terkait dengan keberadaan, serta kualitas dokumen, sehingga masih banyak komponen evaluasi yang tidak disertai dengan catatan dan rekomendasi terkait dengan pemanfaatan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perlu memastikan kembali setiap sasaran strategis dalam dokumen rencana strategis Kementerian Perhubungan telah masuk ke dalam kelompok *perspective (Balance Scorecard)* yang sesuai agar tidak terdapat kinerja yang seharusnya dilaksanakan oleh unit kerja teknis namun masuk ke dalam dokumen perencanaan unit kerja dukungan;
- 2) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja Kementerian maupun unit kerja untuk memastikan target kinerja telah memenuhi prinsip logis, *achievable*, dan juga menantang serta telah selaras dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 3) Memastikan seluruh rencana kegiatan di dalam dokumen rencana aksi unit kerja telah dilengkapi dengan *output* kegiatan;
- 4) Memastikan bahwa dokumen indikator kinerja utama (IKU) seluruh unit kerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan indikator kinerja utama;

- 5) Mendorong unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi *e-performance* secara optimal dengan melaporkan capaian kinerja secara tepat waktu serta memanfaatkan hasil pemantauan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan strategi untuk mencapai target kinerja;
- 6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja tingkat Kementerian dan unit kerja dengan menyajikan perbandingan antara capaian kinerja Kementerian/unit kerja dengan rata-rata capaian di tingkat internasional;
- 7) Memastikan dokumen laporan kinerja seluruh unit kerja telah menyajikan informasi terkait analisis efisiensi serta perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir yang terdapat pada dokumen rencana strategis;
- 8) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
- 9) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyajikan catatan serta rekomendasi yang memadai (pemenuhan, kualitas, serta pemanfaatan) di setiap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perhubungan.